



LAPORAN KINERJA 2024

**DIREKTORAT
PENGENDALIAN
KERUSAKAN LAHAN**



Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas terselesaikannya Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan (Dit PKL) Tahun 2024.

Sebagai laporan kinerja kelima pada periode Rencana Strategis Direktorat PKL 2020-2024, informasi yang disajikan masih menitikberatkan pada kontribusi Dit PKL untuk meningkatkan nilai indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dan menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan akibat lahan kritis/ tidak produktif ataupun kegiatan pertambangan. Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mencapai *output* tahun 2024 adalah pembinaan terhadap kab/kota dalam hal inventarisasi ruang terbuka hijau (RTH), pelaporan IKTL kab/kota berdasarkan data RTH, dan pemulihan kerusakan lahan di 15 lokasi yaitu Kabupaten Toba, Kabupaten Merangin, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Banjarbaru. Selain pemulihan terhadap jasa lingkungan, kegiatan ini juga menjadi pengungkit untuk menggerakkan perekonomian kehidupan sosial masyarakat di sekitar lokasi pemulihan sehingga pasca pemulihan diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan lokasi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kinerja yang dihasilkan ini tidak lepas dari kontribusi seluruh staf Dit PKL dalam menjalankan organisasi dengan tata kelola dan kinerja yang baik, sehingga berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Besar harapan Saya, dengan terbitnya Laporan Kinerja Tahun 2024, informasi yang disajikan dapat memberikan gambaran utuh mengenai permasalahan dan langkah strategis yang telah dilakukan oleh Dit PKL sehingga dapat bermanfaat bagi publik dan khalayak yang berkepentingan di bidang pemulihan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan dan lahan tidak produktif, khususnya bagi pemerintah daerah, lembaga adat dan dunia usaha.

Jakarta, Januari 2025



Edy Nugroho Santoso

NIP. 19661204 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi.....	3
1.2.1 Struktur Organisasi.....	3
1.2.2 Tugas dan Fungsi	3
1.2.3 Sumber Daya Manusia	5
1.2.4 Keuangan	5
BAB II PERENCANAAN	7
2.1. Rencana Strategis tahun 2019-2024.....	7
2.2. Rencana Kerja tahun 2024	1
2.3. Perjanjian Kinerja 2024.....	4
2.3.1 PK Eselon II.....	4
2.3.2 PK Subdit Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lahan	4
2.3.3 PK Subdit Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan.....	5
2.3.4 PK Subbag Tata Usaha	5
1.4. Pohon Kinerja.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	8
3.1. Metode pengukuran.....	8
3.1.1 Pengukuran Kinerja	8
3.1.2 Pengukuran penyerapan anggaran.....	8
3.1.3 Efektifitas & Efisiensi	8
3.2. Capaian Kinerja Eselon II.....	9
3.2.1 Capaian Kinerja Subdit Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lahan	9
3.2.2 Capaian Kinerja Subdit Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lahan	21
3.2.3 Capaian Kinerja Subbag TU	40
3.3 Capaian Realisasi Anggaran.....	41
BAB IV PENUTUP	45
4.1. Kesimpulan	45
4.2. Kendala	45
4.3. Tindak Lanjut.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kepegawaian Direktorat PKL Berdasarkan Status Kepegawaian	5
Tabel 2. Kepegawaian Direktorat PKL Berdasarkan Kelompok Fungsional	5
Tabel 3. Sasaran Kegiatan Direktorat PKL.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. Target Kinerja Dit. PKL Tahun 2020-2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5. Output Kegiatan Dit. PKL.....	1
Tabel 6. IKK 1, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Perencanaan	2
Tabel 7. IKK 2, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Perencanaan	2
Tabel 8. IKK 3, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Perencanaan	3
Tabel 9. IKK 1 Unit Kegiatan Pengendalian (Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan)	3
Tabel 10. IKK 2 Unit Kegiatan Pengendalian (Jumlah perusahaan tambang yang memiliki hasil penilaian pengendalian kerusakan lahan).....	3
Tabel 11. Perjanjian Kinerja Direktur PKL	4
Tabel 12. Perjanjian Kinerja Kasubdit Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lahan	4
Tabel 13. Perjanjian Kinerja Kasubdit Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan.....	5
Tabel 14. Perjanjian inerja Kepala Subbagian Tata Usaha.....	5
Tabel 15. Capaian Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Lahan Tahun 2024.....	14
Tabel 16. Perbandingan nilai koefisien antara hasil model dengan hasil penilaian koefisien KLHK.....	17
Tabel 17. Status Pengisian Program Indonesia Hijau 2024.....	18
Tabel 18. Perbandingan Pengisian Program Indonesia Hijau 2022-2024.....	18
Tabel 19. Pemulihan Kerusakan Lahan Tahun 2024	24
Tabel 20. Potensi Ekonomi Kab. Banjarnegara	27
Tabel 21. Potensi Ekonomi Kab. Temanggung	29
Tabel 22. Jenis Pohon atau tanaman pada kegiatan pemulihan.....	32
Tabel 23. Pelembagaan yang dibentuk di tahun 2024	36
Tabel 24. Capaian Subdit PSKL dibandingkan dengan Renstra.....	38
Tabel 25. Capaian Kinerja Subbagian TU	41
Tabel 26. Capaian Penyerapan Anggaran	42
Tabel 27. Efisiensi Kegiatan Dit PKL	43
Tabel 28. Efektifitas Kegiatan Dit PKL	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	3
Gambar 2. Pohon Kinerja Dit PKL	7
Gambar 3. Tren Capaian IKL 2020-2024	14
Gambar 4. Perbandingan Nilai IKL Provinsi Tahun 2023 dan 2024	15
Gambar 5. Matriks Perubahan Kategori IKL 2023-2024	15
Gambar 6. Lokasi Pemulihan di Tahun 2020-2024.....	22
Gambar 7. Tren Luasan Area yang Dipulihkan Tahun 2020-2024.....	22
Gambar 8. Sebelum & Sesudah Kegiatan Pemulihan Kab. Banjarnegara.....	28
Gambar 9. Sebelum & Sesudah Kegiatan Pemulihan Kab. Temanggung.....	30
Gambar 10. Sebelum & Sesudah Kegiatan Pemulihan Kab. Kuningan	34
Gambar 11. Perbandingan Target dan Capaian Pemulihan 2020-2024	35
Gambar 12. Tren Luas Lahan yang Difasilitasi Pemulihannya	35
Gambar 13. Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina tahun 2020 – 2024	38
Gambar 14. Luas lahan terganggu dibandingkan luas lahan revegetasi.....	39
Gambar 15. Capaian Peringkat PROPER KKL Tahun 2023 - 2024	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan (Dit PKL) dibentuk pada Tahun 2021, Direktorat ini semula bernama pemulihan lahan akses terbuka (PKLAT) yang dibentuk pada tahun 2015 dari penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu permasalahan lingkungan yaitu kerusakan lahan akibat kegiatan penambangan yang dilakukan masyarakat tanpa izin. Seiring dengan berkembangnya kegiatan Direktorat, tujuan dari kegiatan direktorat tidak hanya fokus pada kegiatan pertambangan saja, tetapi juga fokus lahan yang tidak produktif yang dapat difulihkan fungsi lingkungan. Direktorat Pengendalian Kerusakan lahan memiliki kegiatan pemulihan menyediakan lahan dengan kualitas yang memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memanfaatkan hasil pemulihan dan memprosesnya menjadi produk barang maupun jasa yang ramah lingkungan sehingga memperoleh penghasilan dalam bentuk uang. Tanah sebagai salah satu faktor produksi dalam proses produksi, misalnya buah- buahan, menjadi salah satu obyek yang harus dipulihkan dari semula rusak akibat kegiatan penambangan menjadi tanah yang memiliki kesuburan untuk mendukung pertumbuhan tanaman buah- buahan. Sasaran kegiatan yang ditargetkan tercapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya luasan lahan bekas pertambangan yang terpulihkan dan akan diukur tingkat pencapaiannya menggunakan indikator (output) yaitu luas lahan bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan. Kegiatan pemulihan pada lahan yang tidak produktif merupakan usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan yang rusak sehingga berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya mengikuti Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten yang berlaku. Berfungsinya lahan secara optimal tidak hanya dari aspek fungsi lingkungan tetapi juga dari aspek kemanfaatan secara ekonomi dan sosial sehingga hasil pemulihan tersebut secara optimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil studi kelayakan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan di lokasi lahan bekas penambangan rakyat dan lahan tidak produktif lainnya memberikan gambaran tentang hilangnya jasa-jasa ekosistem lahan akibat kegiatan penambangan rakyat tanpa izin dan lahan tidak produktif lainnya yang menyebabkan hilangnya jasa lingkungan pendukung ditunjukkan dengan

permukaan tanah dalam kondisi tidak beraturan, material hasil penggalian yang tidak diinginkan dibuang di sekitar lubang, tekstur tanah didominasi oleh pasir dengan porositas tinggi (tanah tidak memiliki kemampuan untuk menahan air), keberadaan top soil sangat sedikit sebagai media perakaran tanaman, dan kesuburan tanah yang rendah. Terganggunya jasa lingkungan pengaturan ditunjukkan dengan kondisi penutupan lahan yang bervariasi yaitu lahan terbuka tanpa vegetasi, vegetasi semak, dan semak belukar. Area bekas tambang yang memiliki kelerengan >15% berpotensi mengakibatkan erosi dan sedimentasi. Dari hasil tersebut maka hal utama yang penting dipertimbangkan dalam kegiatan pemulihan ini adalah menata ulang lapisan permukaan tanah (penataan lahan) agar mempunyai lereng yang stabil untuk mengurangi erosi permukaan dan penyiapan area penanaman untuk kegiatan revegetasi serta perbaikan kualitas lahan. Demikian juga, pemilihan jenis penutup tanah (*cover crops*) maupun jenis pionir sebagai tanaman pelindung serta jenis tanaman lokal lainnya yang tepat sesuai dengan kondisi lingkungannya agar diperoleh hasil pemulihan secara optimal sesuai yang diharapkan.

Hasil pekerjaan pemulihan selama periode 2015-2024 memberikan gambaran secara umum bahwa pertumbuhan tanaman belum optimal sesuai dengan yang diharapkan. Hambatan yang membatasi pertumbuhan tanaman tersebut diduga karena kondisi kesuburan tanah masih rendah (kadar bahan organik dalam tanah masih rendah). Kondisi ini diperburuk dengan masih rendahnya usaha pemeliharaan oleh masyarakat dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat seperti biaya pemeliharaan, pupuk organik, masyarakat yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam budidaya tanaman. Sementara itu, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi belum memberikan dukungan secara optimal dalam kegiatan pemeliharaan. Pemulihan kerusakan lahan akibat kegiatan penambangan rakyat tanpa izin memiliki tantangan tidak hanya berasal dari menurunnya kualitas lahan dan hilangnya lapisan tanah perakaran (*top soil*) tetapi juga aspek sosial ekonomi masyarakat. Berhasil atau tidaknya kegiatan pemulihan ini dipengaruhi oleh masyarakat sebagai aktor yang harus berpartisipasi untuk mengambil peran dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengelolaan hasil pemulihan pada fase pasca pemulihan.

1.2. Struktur Organisasi

1.2.1 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan telah dibentuk struktur organisasi seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan

1.2.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan isu dan permasalahan serta kondisi lahan seperti tersebut di atas, pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan berkelanjutan dapat terwujud apabila pengelolaannya dilakukan secara terpadu dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada pasal 326 memberikan fungsi kepada Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian kerusakan lahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian kerusakan lahan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan dan pengendalian kerusakan lahan

- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian kerusakan lahan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan pengendalian kerusakan lahan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengendalian kerusakan lahan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat

Subdit Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lahan

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bina pengendalian kerusakan lahan,

Subdit Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan

Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Lahan mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian sumber kerusakan lahan

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat

1.2.3 Sumber Daya Manusia

Tabel 1. Kepegawaian Direktorat PKL Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	%
1	PNS	40	88,89
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	5	11,11
	TOTAL	45	100

No.	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	I	0	-
2	II	2	5
3	III	31	77,5
4	IV	7	17,5
	TOTAL	40	100

Tabel 2. Kepegawaian Direktorat PKL Berdasarkan Kelompok Fungsional

No	Jenis Fungsional	Jumlah
1	Perencana Madya	1
2	Perencana Ahli Pertama	1
3	Pengendali Dampak Lingkungan Muda	6
4	Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	11
5	Penyuluh Lingkungan Hidup Pertama	3
6	Arsiparis	1
7	Fungsional Umum	22

1.2.4 Keuangan

Berdasarkan DIPA KLHK 2024, pagu anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan Tahun 2024 sebesar Rp. 23.867.347.000 (dua puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk membiayai seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung. Pagu anggaran ini mengalami penyesuaian sehingga jumlah anggaran yang tersedia menjadi sebesar Rp. 21.612.925.000 (dua puluh satu milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Anggaran tersebut telah termasuk kegiatan sekretariat IKLH dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,-. Realisasi anggaran untuk tahun 2024 sebesar 99,69% atau sebesar Rp.21.546.939.847,- (dua puluh satu milyar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah)

BAB II PERENCANAAN

2.1. Rencana Strategis tahun 2020-2024

Perencanaan Strategis pada dasarnya adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dan melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, dengan demikian Renstra Direktorat PKL merupakan sebuah petunjuk (*guidance*) yang akan digunakan oleh organisasi dalam lingkup Direktorat PKL untuk mengelola kondisi saat ini menuju capaian 5 tahun ke depan. Berdasarkan PN. 6, Renstra KLHK (Revisi), dan Renstra Ditjen PPKL 2020-2024 (Revisi) yang menuliskan Indikator Kinerja sebagai hasil capaian yang akan dimonitor pada PN. 6, maka Direktorat PKL menyusun program-program yang dapat mengakomodasi Indikator Kinerja yang ada. Kegiatan yang dipilih menjadi Kegiatan Prioritas yang telah diturunkan dari KLHK untuk selanjutnya menjadi Pro-PN untuk dicapai oleh Ditjen PPKL dan Direktorat yang ada di bawahnya. Sasaran Kegiatan dan juga IKK yang dipilih diatur berdasarkan SK. 52/PPKL/SET/REN.0/4/2020 Tentang penetapan IKU Ditjen PPKL.

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan dalam lingkup Ditjen PPKL

No.	Kegiatan yang dilakukan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan
1.	Pengendalian Kerusakan Lahan	Tersedianya data indeks kualitasutupan lahan	Jumlah kab/kota yang terpantauutupan lahannya	Kab/kota
		Terlaksananya penilaian kinerja Kab/Kota dalam upaya Pengendalian kerusakan lahan	Jumlah kab/kota yang melakukan upaya kinerja pengendalian kerusakan Lahan	Kab/kota
		Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian kerusakan lahan terhadap usaha dan/atau kegiatan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	Perusahaan
		Meningkatnya lahan yang dipulihkan <i>(sumber: renstra KLHK hal 153, permenlhk no 1/2022)</i>	Luas lahan yang difasilitasi pemulihannya <i>(sumber: renstra KLHK hal 153, permenlhk no 1/2022)</i>	Hektare

Penentuan target kinerja masing-masing komponen kegiatan Dit PKL dilakukan sejalan dengan pemenuhan sasaran program Dit. PKL yang telah ditetapkan, yakni pencapaian nilai IKTL. Target-target yang disajikan pada Tabel di bawah merupakan target optimal yang realistis dilaksanakan langsung oleh Dit. PKL. Dit PKL juga mengambil peran dalam mendorong Pemerintah Daerah dan Stakeholder lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk lebih aktif melakukan pemulihan dalam upaya pencapaian target nilai IKTL. Berikut adalah Tabel Target Kinerja Dit PKL Tahun 2020-2024.

Tabel 4. Target Kinerja Dit. PKL Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Sasaran Unit kegiatan	Indikator Kinerja unit kegiatan	Satuan Target	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	Tersedianya data indeks kualitas tutupan lahan	Jumlah kab/kota yang terpantau kualitas tutupan lahan	Kab/kota	Tersedianya data tutupan lahan	Jumlah kab/kota yang memiliki data tutupan lahan	Layanan	514	514	514	514	514
		Terlaksananya penilaian kinerja Kab/Kota dalam Upaya pengendalian kerusakan lahan	jumlah kab/kota yang melakukan upaya pengendalian kerusakan lahan	Kab/kota	Terlaksananya pelaporan upaya kinerja pengendalian kerusakan lahan	Jumlah kab/kota yang melaporkan upaya kinerja pengendalian kerusakan lahan	Kab/kota	-	-	-	514	514
		Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian kerusakan lahan terhadap usaha dan/atau kegiatan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	Industri	Terlaksananya evaluasi kinerja industri pertambangan dalam pengendalian kerusakan lingkungan	Jumlah industri yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan	Industri	80	85	90	100	113
		Meningkatnya lahan yang dipulihkan (sumber: renstra KLHK hal 153, permenlhk no 1/2022)	Luas lahan yang difasilitasi pemulihannya (sumber: renstra KLHK hal 153, permenlhk no 1/2022)	hektare	Terlaksananya pemulihan lahan	Luas lahan yang dipulihkan	Hektare	11.67	30	90	148	120

					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah Lembaga yang dilakukan peningkatan kapasitas	Lembaga	2	3	5	5	5
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen PPKL	Poin	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP Direktorat PKL	Poin	Tersedianya bahan pelaksanaan evaluasi mandiri penyelenggaraan SAKIP	Bahan pelaksanaan evaluasi mandiri SAKIP	Set	1	1	1	1	1

2.2. Rencana Kerja tahun 2024

Untuk menjamin tercapainya sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dit PKL beserta perubahannya dengan indikator-indikator yang bisa diukur setiap tahunnya, pada tahun 2024 arah kebijakan yang dilakukan Dit PKL mendorong peningkatan indeks kualitas tutupan lahan melalui pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan teknis dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait lainnya dan upaya pemulihan yang sudah menjadi target tahunan pada Dit PKL.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024, Dit PKL memiliki 4 (tiga) output kegiatan sebagai berikut

Tabel 3. Output Kegiatan Dit. PKL

Kode	Output Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)
6033.QMA.005	Data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan	514 Layanan	833.440.000
6035.REA.001	Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang Dipulihkan	120 Hektare	16.888.587.000
6034.QDI.003	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan	113 Industri	766.107.000
6035.UBA.001	Layanan Kinerja Kab/kota dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lahan	514 (Prov/Kab/Kota)	1.124.791.000
	Sekretariat IKLH		2.000.000.000

Sasaran yang ingin dicapai dari unit kegiatan perencanaan pengendalian kerusakan lahan adalah tersedianya data dan informasi kualitas tutupan lahan untuk tahun 2024. Data yang dihasilkan dari kegiatan ini diharapkan dapat digunakan untuk menghitung nilai IKTL Kab/Kota, Provinsi, dan Nasional. Selain itu data dan informasi ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan lokasi pemulihan lahan bekas pertambangan rakyat yang terlantar ataupun kegiatan lain. Hasil (output) yang diinginkan dari kegiatan perencanaan ini adalah tersedianya data dan informasi kualitas tutupan lahan. Adapun indikator kinerja

unit kegiatan (IKK), target kinerjanya dalam tahun 2024, serta tahapan pencapaian IKK diuraikan sebagai berikut

Tabel 4. IKK 1, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Perencanaan

Unit Kegiatan	:	Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lahan
Sasaran Unit Kegiatan	:	Tersedianya data tutupan lahan
Indikator Unit Kegiatan	:	Jumlah kab/kota yang memiliki data tutupan lahan
No	Elemen Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2024
1	Pengolahan data Kualitas Tutupan Lahan	514 layanan
2	Penghitungan Data Indeks Kualitas Tutupan Lahan	514 kab/kota
3	Penyusunan Kajian Kualitas Tutupan Lahan	1 Dokumen
4	Sosialisasi/Bimbingan Teknis, pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam peningkatan kualitas tutupan lahan bagi aparat Pemerintah Daerah	4 Kegiatan

Mengacu pada data dan informasi informasi kualitas tutupan lahan setiap kabupaten/kota yang didapat, Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lahan mengadakan penilaian upaya kinerja pengendalian kerusakan lahan, kegiatan ini bertujuan untuk menilai bagaimana respon daerah dalam meningkatkan nilai IKTL di masing-masing daerah. Kegiatan ini tertuang dalam elemen kegiatan terlaksananya peningkatan kapasitas daerah untuk dilakukannya penilaian upaya daerah dalam pengendalian kerusakan lahan.

Tabel 5. IKK 2, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Perencanaan

Unit Kegiatan	:	Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lahan
Sasaran Unit Kegiatan	:	Terlaksananya penilaian upaya kinerja pengendalian kerusakan lahan
Indikator Unit Kegiatan	:	Jumlah kab/kota yang dinilai upaya kinerja pengendalian kerusakan lahan
No	Elemen Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2024
1	Terlaksananya peningkatan kapasitas daerah dalam upaya pengendalian kerusakan lahan	514 Daerah (Prov/Kab/Kota)

Dalam menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi, Subdit Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lahan memiliki kegiatan asistensi untuk penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja di sektor publik yang mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Kegiatan ini tertuang dalam elemen kegiatan Terkumpulnya dokumen bahan penilaian SAKIP.

Tabel 6. IKK 3, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Perencanaan

Unit Kegiatan	:	Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lahan
Sasaran Unit Kegiatan	:	Tersedianya bahan pelaksanaan evaluasi mandiri penyelenggaraan SAKIP
Indikator Unit Kegiatan	:	Bahan pelaksanaan evaluasi mandiri SAKIP
No	Elemen Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2024
1	Terkumpulnya dokumen bahan penilaian SAKIP	1 set

Pada kegiatan pengendalian sumber kerusakan lahan, Sasaran yang ingin dicapai adalah *tersedianya Pemulihan Lahan dan peningkatan Kapasitas Kelembagaan*. Hasil (output) yang diinginkan dari kegiatan pengendalian sumber kerusakan lahan adalah tersusunnya rencana pemulihan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemulihannya di tingkat tapak, terbentuknya skema pelebagaan pengelola lahan pemulihan.

Tabel 7. IKK 1 Unit Kegiatan Pengendalian (Luasan lahan yang difasilitasi pemulihannya)

Unit Kegiatan	:	Sub Direktorat Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan
Sasaran Unit Kegiatan	:	1. Tersedianya Pemulihan Lahan 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Indikator Unit Kegiatan	:	1. Luas Lahan yang Dipulihkan 2. Jumlah Lembaga yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas
No	Elemen Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2024
1	Terlaksananya pemulihan lahan	120 ha
2	Terbentuknya kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengelola lahan pasca pemulihan lahan	13 lembaga

Selain bertanggung jawab atas pencapaian IKK 1 Sub Direktorat Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan juga bertanggung jawab atas pencapaian IKK 2 yaitu *Jumlah perusahaan tambang yang memiliki hasil penilaian Pengendalian Kerusakan Lahan sebanyak 113 industri*. Hasil (output) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Terjaminnya efektifitas Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan dengan demikian dapat memberikan kontribusi terhadap sasaran program yaitu meningkatnya kualitas tutupan lahan.

Tabel 8. IKK 2 Unit Kegiatan Pengendalian (Jumlah perusahaan tambang yang memiliki hasil penilaian pengendalian kerusakan lahan)

Unit Kegiatan	:	Sub Direktorat Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan
Sasaran Unit Kegiatan	:	Terlaksananya evaluasi kinerja industri pertambangan dalam

		pengendalian kerusakan lingkungan
Indikator Unit Kegiatan	:	Jumlah industri yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan
No	Elemen Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2024
1	Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan	113 industri

2.3. Perjanjian Kinerja 2024

2.3.1 PK Eselon II

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Direktur PKL

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65,9
2	Tersedianya data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan	Data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan	514 layanan
3	Meningkatnya Kapasitas Industri dalam Pengendalian Kerusakan Lahan	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungan	113 industri
4	Meningkatnya Luasan Lahan yang dipulihkan	Luasan Lahan yang Dipulihkan Kerusakannya	120 ha
5	Terlaksananya evaluasi mandiri penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Dokumen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 laporan
6	Terselenggaranya Penilaian Mandiri SAKIP dan SPIP	Nilai SAKIP	79
7	Terlaksananya evaluasi dan pelaporan berkala (bulanan, triwulanan dan Laporan Kinerja/LKj)	Laporan capaian kinerja berkala	12 laporan
8	Terlaksananya Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga	Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga	2 kegiatan
9	Terlaksananya pembinaan Pegawai	Terlaksananya Pembinaan Pegawai	2 kegiatan

2.3.2 PK Subdit Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lahan

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Kasubdit Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lahan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai indeks kualitas tutupan lahannya	38 provinsi dan 514 kab/kota
		Provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai indeks respon lingkungan hidup untuk penerapan program Indonesia Hijau	514 kab/kota dan 38 Provinsi
		Pembinaan berupa bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah	4 kegiatan pembinaan
		Kajian kualitas tutupan lahan	1 laporan

2	Tersedianya data dan informasi kualitas tutupan lahan	Data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan	514 layanan
		Data potensi peningkatan kualitas tutupan lahan	1 set
		Data indikasi kerusakan lahan	1 set
3	Tersedianya bahan pelaksanaan evaluasi mandiri penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Bahan pelaksanaan evaluasi mandiri SAKIP	1 set
4	Terlaksananya evaluasi dan pelaporan berkala (bulanan, triwulanan dan Laporan Kinerja/LKj)	Laporan capaian kinerja berkala	17 laporan

2.3.3 PK Subdit Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Kasubdit Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan

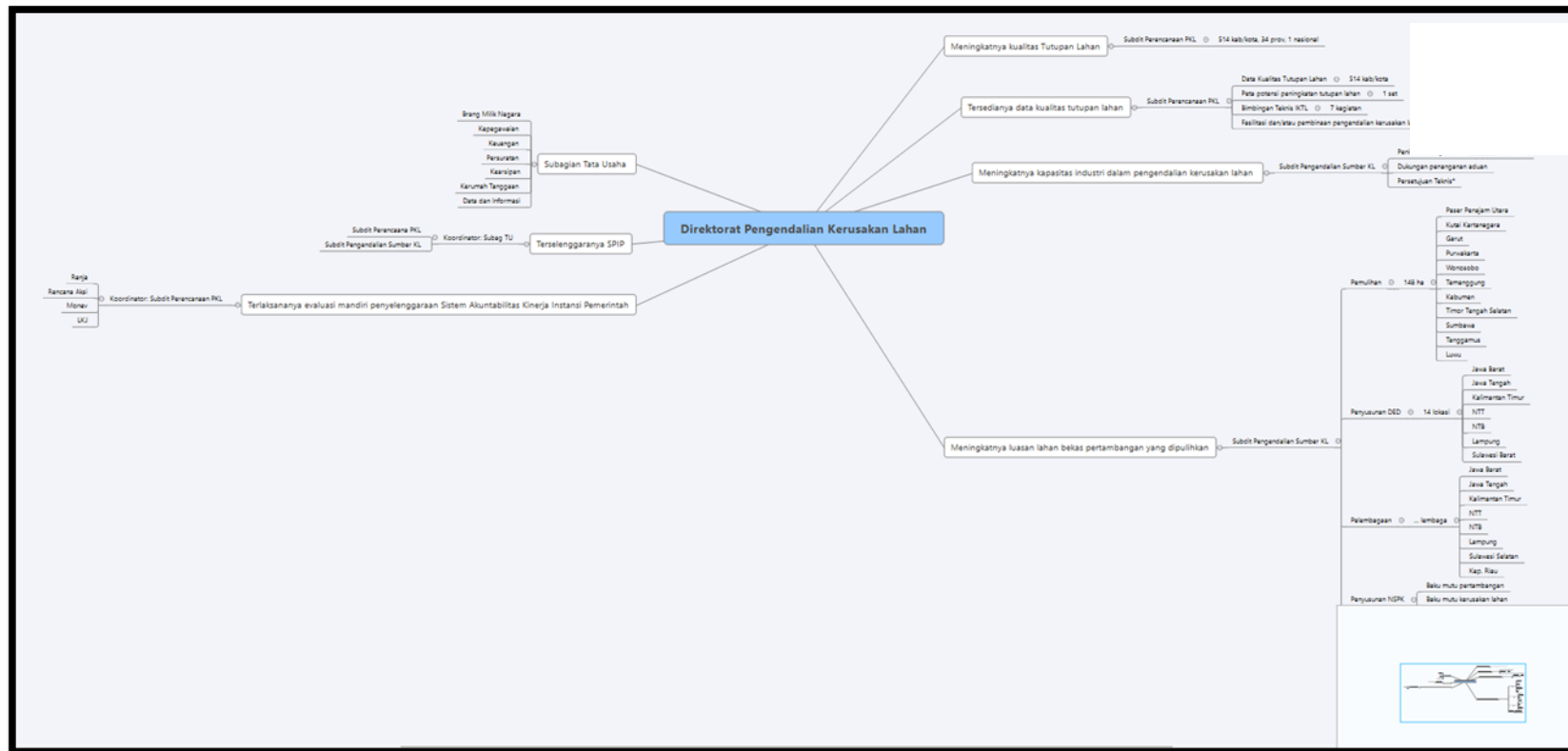
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya luasan lahan yang dipulihkan	Luas lahan rusak/tidak produktif yang dipulihkan	120 ha
2	Terlaksananya evaluasi kinerja industri pertambangan dalam pengendalian kerusakan lingkungan	Jumlah industri yang taat dalam pengendalian kerusakan lahan	113 industri
		Jumlah perusahaan yang meningkat nilai kinerjanya dalam pengendalian kerusakan lahan sebesar 50% dari kategori merah	22 industri
3	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mengelola pemulihan lahan	Jumlah kelompok pengelola pemulihan lahan	13 kelompok

2.3.4 PK Subbag Tata Usaha

Tabel 12. Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian Tata Usaha

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
K1	Terlaksananya penyelenggaraan ketatausahaan	Terlaksananya administrasi persuratan	1000 surat
		Terlaksananya urusan administrasi kearsipan	5 dokumen
		Terlaksananya urusan administrasi Barang Milik Negara	1 laporan
		Terlaksananya urusan kerumahtanggaan	4 layanan
		Terlaksananya urusan administrasi keuangan	1 laporan
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Terlaksananya koordinasi penyusunan SPIP	5 laporan
3	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP	Nilai SAKIP Mandiri	79
4	Terlaksananya evaluasi dan pelaporan berkala (bulanan, triwulanan dan Laporan Kinerja/LKj)	Laporan capaian kinerja berkala	12 laporan
5	Terlaksananya Pembinaan Staf	Terlaksananya urusan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai	2 kali

1.4. Pohon Kinerja



Gambar 2. Pohon Kinerja Dit PKL

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Informasi yang termasuk dalam pengukuran kinerja antara lain (1) efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; (2) kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); (3) hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; serta (4) efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan

3.1. Metode pengukuran

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Proses ini dilakukan dengan menilai pencapaian setiap target kinerja untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kegiatan}}{\text{Rencana (Target)}} \times 100$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target penetapan kinerja. Semakin tinggi realisasi kinerja, semakin baik pencapaian indikator kinerja

3.1.2 Pengukuran penyerapan anggaran

Penyerapan anggaran dihitung dengan membandingkan antara realisasi penggunaan anggaran dengan rencana anggaran (pagu). Semakin tinggi realisasi penggunaan anggaran

$$\text{Capaian Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana (Pagu)}} \times 100$$

3.1.3 Efektifitas & Efisiensi

Perhitungan efektifitas kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Apabila hasil

perbandingan tersebut lebih dari satu maka capaian kinerja tahun ini lebih efektif dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu

$$Efektifitas = \frac{Capaian\ Kinerja\ Tahun\ Ini\ (\%)}{Capaian\ Kinerja\ Tahun\ Lalu\ (\%)}$$

Efesiensi kinerja dihitung dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran. Apabila hasil perbandingan tersebut lebih dari satu maka pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan efisien

$$Efisiensi = \frac{Capaian\ Kinerja\ (\%)}{Capaian\ Penyerapan\ Anggaran\ (\%)}$$

3.3. Capaian Kinerja Eselon II

3.2.1 Capaian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan

Berdasarkan perjanjian kinerja Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan Tahun 2024 dan hasil pelaksanaan kegiatannya, maka diperoleh capaian kinerja sebagaimana pada Tabel ...berikut.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase
1	Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65,9	61,96	94,02
2	Data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan	514 layanan	514 layanan	100,00
3	Jumlah usaha dan/kegiatan tambang yang meningkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan	113 industri	170 industri	150,00
4	Luasan lahan yang dipulihkan kerusakannya	120 hektar	150,43 hektar	125,36
5	Dokumen pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 laporan	1 laporan	100,00
6	Nilai SAKIP	79	83,46	105,65
7	Laporan Capaian Kinerja Berkala	12 laporan	12 laporan	100,00
8	Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00
9	Terlaksananya Pembinaan Pegawai	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00

Memperhatikan capaian kinerja di atas, maka sebagian besar indikator kinerja sudah mencapai target yang telah disepakati dengan nilai capaian $\geq 100\%$, hanya ada satu indikator kinerja, yang capaiannya di bawah 100% yaitu nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Sejumlah faktor mempengaruhi capaian kinerja ini

seperti adanya perubahan fungsi lahan dan validasi data yang diinput belum sesuai kriteria.

3.2.2. Capaian Kinerja Subdit Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lahan

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Presentase
1	Provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai indeks kualitas tutupan lahannya	522	kab/kota dan provinsi	522	kab/kota dan provinsi	100,00%
2	Provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai indeks respon lingkungan hidup untuk penerapan program Indonesia Hijau	522	kab/ dan provinsi	522	kab/ dan provinsi	100,00%
3	Pembinaan berupa bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah	4	kegiatan pembinaan	4	kegiatan pembinaan	100,00%
4	Kajian kualitas tutupan lahan	1	laporan	1	laporan	100,00%
5	Data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan	514	layanan	514	layanan	100,00%
6	Data potensi peningkatan kualitas tutupan lahan	1	set	1	set	100,00%
7	Data indikasi kerusakan lahan	1	set	1	set	100,00%
8	Bahan pelaksanaan evaluasi mandiri SAKIP	1	set	1	set	100,00%
9	Laporan capaian kinerja berkala	17	laporan	17	laporan	100,00%

Pembinaan

Pembinaan teknis dilaksanakan sebagai Upaya peningkatan nilai RTH dan Indeks Respon Indonesia Hijau. Tahun 2024 prioritas pelaksanaan bimbingan teknis dilaksanakan pada Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Papua Barat Daya. Pembinaan di Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan di Kota Kendari sedangkan Provinsi Papua Barat Daya dilaksanakan di Kota Sorong.

Target peserta pembinaan teknis adalah staf teknis dari kabupaten/kota yang berada di wilayah pelaksanaan bimbingan teknis. Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara diikuti oleh 37 orang peserta yang terdiri dari perwakilan seluruh 17 Kab/Kota, P3E Sulawesi Maluku dan DLH Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk Provinsi Papua Barat Daya diikuti oleh 30 Orang peserta yang berasal dari Kab/Kota, wakil dari DLH Provinsi Papua Barat Daya dan wakil dari kantor P3E Papua.

Materi Pembinaan Teknis

Materi yang disampaikan untuk peserta pembinaan teknis meliputi:

1. Tata Cara Deliniasi RTH dengan Google Earth
2. Tata Cara Penginputan Data RTH ke dalam aplikasi IKLH
3. Tata Cara Penginputan Indonesia Hijau
4. Rencana Aksi Peningkatan Nilai IKTL

Hasil dari pembinaan teknis

Untuk melihat hasil dari pelaksanaan bimbingan teknis, disandingkan status pengisian data IKTL Tahun 2023 dengan data IKTL Tahun 2024 yang diambil dari aplikasi IKLH. Terdapat peningkatan/kenaikan jumlah pemerintah daerah yang menginput data IKTL ke dalam aplikasi IKLH. Pembinaan Teknis dilakukan di 4 provinsi, namun hanya provinsi Sulawesi Tenggara dan Papua Barat Daya yang difasilitasi oleh Direktorat PKL, ada beberapa daerah yang juga dilakukan pembinaan teknis dengan menyediakan narasumber serta menerima konsultasi dari berbagai daerah yang datang konsultasi.

Provinsi Sulawesi Tenggara

KAB/KOTA	PROVINSI	RTH 2023			RTH 2024		
		ISI	JUMLAH TITIK RTH	JUMLAH TITIK TUTUPAN	ISI	JUMLAH TITIK RTH	JUMLAH TITIK TUTUPAN
Kabupaten Bombana	Sulawesi Tenggara	v	14	31	v	10	30
Kabupaten Buton	Sulawesi Tenggara	-	0	0	v	1	0
Kabupaten Buton Selatan	Sulawesi Tenggara	v	1	8	v	1	10
Kabupaten Buton Tengah	Sulawesi Tenggara	-	0	0	v	5	0
Kabupaten Buton Utara	Sulawesi Tenggara	v	4	0	v	4	0
Kabupaten Kolaka	Sulawesi Tenggara	-	0	0	-	0	0
Kabupaten Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara	-	0	0	v	3	0
Kabupaten Kolaka Utara	Sulawesi Tenggara	v	60	7	v	60	5
Kabupaten Konawe	Sulawesi Tenggara	-	0	0	v	4	10
Kabupaten Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara	v	3	0	v	5	3
Kabupaten Konawe Utara	Sulawesi Tenggara	v	164	33	v	164	33
Kabupaten Muna	Sulawesi Tenggara	v	18	18	v	18	18
Kabupaten Muna Barat	Sulawesi Tenggara	v	57	22	v	57	22
Kabupaten Wakatobi	Sulawesi Tenggara	v	9	4	v	9	4
Kota Bau-bau	Sulawesi Tenggara	-	0	0	v	2	0
Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	v	9	4	v	27	0
Kabupaten Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	-	0	0	v	24	9

Provinsi Papua Barat Daya

KAB/KOTA	PROVINSI	RTH 2023			RTH 2024		
		ISI	JUMLAH TITIK RTH	JUMLAH TITIK TUTUPAN	ISI	JUMLAH TITIK RTH	JUMLAH TITIK TUTUPAN
Kabupaten Maybrat	Papua Barat Daya	-	0	0	v	5	0
Kabupaten Raja Ampat	Papua Barat Daya	-	0	0	v	6	1
Kabupaten Sorong	Papua Barat Daya	-	0	0	v	2	0
Kabupaten Sorong Selatan	Papua Barat Daya	-	0	0	v	0	4
Kabupaten Tambrauw	Papua Barat Daya	-	0	0	v	1	0
Kota Sorong	Papua Barat Daya	-	0	0	v	13	16

IKTL

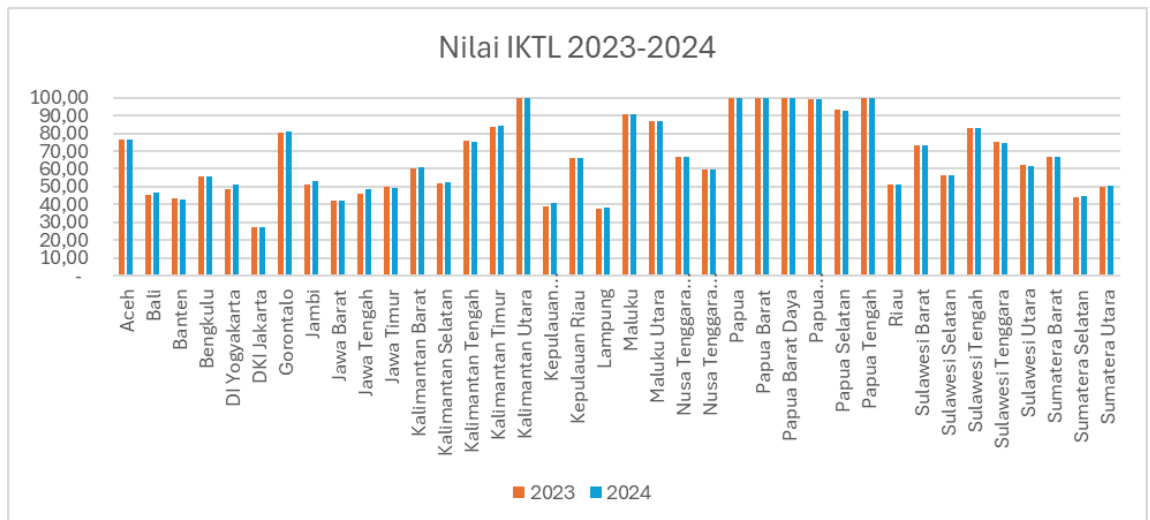
Kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah dinilai menggunakan pendekatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Salah satu unsur indikator yang digunakan untuk menilai adalah kualitas tutupan lahan. Sebagai Indikator Kinerja Utama KLHK maka untuk mendukung pencapaian indikator tersebut Ditjen PPKL melakukan pembinaan kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota sejak dari penyusunan target, delineasi luasan tutupan lahan hingga penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Nilai IKTL Nasional tahun 2024 sebesar 61,96 poin dengan capaian kinerja sebesar 94,02% terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 Ditjen PPKL yaitu sebesar 65,9 poin. Selanjutnya, bila dibandingkan dengan nilai satu tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan secara nasional sebesar 0,31 poin dari 61,65 menjadi 61,96

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target RPJMN 2024	Target Renstra KLHK 2024	Target Renstra PPKL 2024	Target Renja PPKL 2024	PK 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	61,65	-	-	65,9	65,9	65,9	61,96	94,02

Nilai IKTL masing-masing provinsi dapat dilihat pada Gambar



Gambar ... Perbandingan Nilai IKTL 2023-2024

Terdapat 24 provinsi yang mengalami kenaikan nilai IKTL, seperti provinsi DI Yogyakarta, Jambi, Jawa Tengah, Bali, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sebaliknya, terdapat 9 provinsi yang mengalami penurunan nilai IKTL yaitu provinsi Papua Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat dan Jawa Timur. Kenaikan nilai IKTL, secara umum disebabkan oleh peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terverifikasi dan perubahan pertanian lahan kering menjadi hutan lahan kering sekunder seperti di Bali, sedangkan penurunan nilai IKTL seperti di provinsi Sulawesi Tenggara disebabkan antara lain oleh perubahan tutupan hutan menjadi belukar, lahan terbuka, pertambangan, pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campur. Selain itu, penurunan secara umum disebabkan antara lain oleh penurunan luas kawasan belukar dan RTH yang terverifikasi.

Sejak tahun 2020 telah diberlakukan penghitungan Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang merupakan pengembangan dari penghitungan IKTL dengan menambahkan faktor koreksi berupa dampak kebakaran (DK) dan kanal (DKK) pada ekosistem lahan gambut. Dampak kanal turut diperhitungkan dalam IKTL dengan pertimbangan bahwa pembangunan kanal mengakibatkan tinggi muka air tanah pada lahan gambut mengalami penurunan sehingga lahan gambut cenderung mengering dan meningkatkan resiko terjadinya kebakaran pada musim kemarau. Aktivitas pembangunan kanal terindikasi berkorelasi dengan perubahan

tutupan lahan pada lahan gambut tersebut. Penghitungan IKL dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

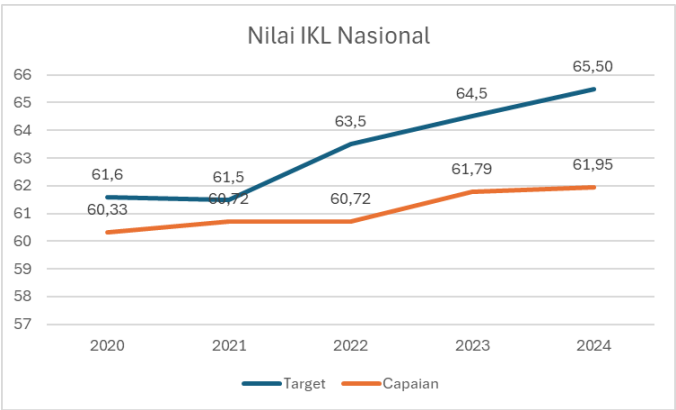
$$IKL=100-((84,3-((TL-DKK) \times 100)) \times 50/(54,3))$$

Keterangan:

TL : Tutupan Lahan

DKK : Dampak Kebakaran dan Dampak Kanal

Perubahan kualitas lahan secara nasional diharapkan dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nilai IKL Nasional tahun 2024 sebesar 61,95 poin dengan capaian kinerja sebesar 94,58% terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 Ditjen PPKL yaitu sebesar 65,5 poin. Meskipun tidak mencapai target, nilai IKL 2020-2023 memiliki tren positif dan pada tahun 2024 nilai IKL menunjukkan peningkatan sebesar 0,16 poin dari nilai tahun 2023.



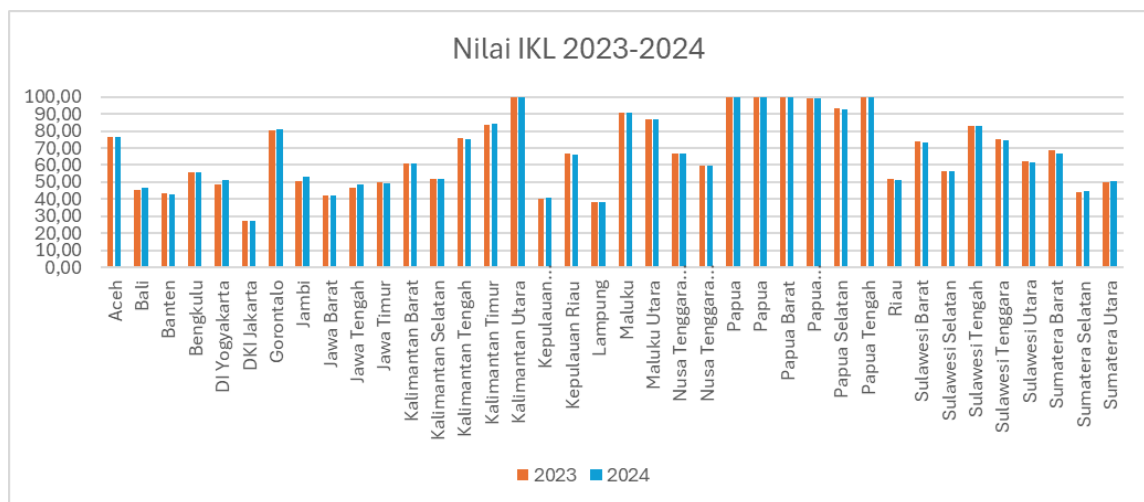
Gambar 3. Tren Capaian IKL 2020-2024

Tabel 13. Capaian Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Lahan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target RPJMN 2024	Target Renstra KLHK 2024	Target Renstra PPKL 2023	Target Renstra PPKL 2024	Target Renja PPKL 2024	PK 2024	Realisasi 2024	Capaian 2023 (%)	Capaian 2024 (%)
Indeks Kualitas Lahan	61,95	65,5	65,5	64,5	65,5	65,5	65,5	61,95	95,79	94,58

Berdasarkan hasil penghitungan IKL Provinsi Tahun 2024, maka diketahui bahwa terdapat 18 provinsi mengalami kenaikan nilai IKL, enam provinsi nilainya tetap dan 14 provinsi yang mengalami penurunan nilai IKL. Peningkatan nilai IKL

yang cukup signifikan secara berturut-turut terjadi pada yaitu Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali dan Provinsi Gorontalo, sedangkan hanya provinsi yang mengalami penurunan signifikan yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penurunan nilai IKL disebabkan antara lain oleh penurunan luas belukar baik dalam kawasan hutan maupun dalam fungsi lindung yang signifikan dan keberadaan kanal. Perbandingan nilai IKL Provinsi Tahun 2023-2024 disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Perbandingan Nilai IKL Provinsi Tahun 2023 dan 2024

Mengacu pada hasil penilaian IKL pada lingkup kabupaten/kota, jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan kategori sebanyak 17 daerah, lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kab/kota yang mengalami penurunan kategori, yaitu sebanyak 10 daerah.

		2024				
		Sangat baik	Baik	Sedang	Kurang	Sangat Kurang
2023	Sangat Baik	58	2			
	Baik	0	80	1		
	Sedang		0	124	4	
	Kurang			10	204	3
	Sangat Kurang				7	19

Gambar 5. Matriks Perubahan Kategori IKL 2023-2024

Daerah yang mengalami penurunan antara lain:

- Sangat baik ke baik : Kota Sorong, Kab. Buton Utara
- Baik ke sedang : Kab. Pesisir Selatan

- Sedang ke kurang : Kab. Badung, Kota Kendari, Kab. Kep. Sangihe, Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
- Kurang ke sangat kurang : Kota Bandung, Kota Pontianak, Kota Palembang

Sedangkan daerah yang mengalami kenaikan antara lain

- Sangat kurang ke kurang : Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kota Pekalongan, Kab. Siduarjo, Kab. Tulang Bawang, Kota Prabumulih, Kab. Batubara
- Kurang ke sedang : Kab. Bandung Barat, Kab. Magelang, Kab. Sragen, KAb. Wonosobo, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Sidendeng Rappang, Kab. Banggai Kepulauan, Kota Bitung

Kajian

Kecenderungan semakin menurunnya nilai IKTL seiring dengan berkurangnya tutupan hutan, sehingga perlu dilakukan modifikasi metode perhitungan dengan penambahan parameter penghitungan di luar hutan yang memperhatikan koridor sebagai kawasan berfungsi lindung dan karakteristik wilayah masing-masing provinsi (contoh: klerengan, lahan gambut, dll), serta mempertimbangkan proses perubahan tutupan lahan, sehingga kinerja kebijakan lingkungan (implementasi program) dapat terlihat dan adanya indikator yang menilai kinerja (*effort*) penanaman (*performance forest rehabilitation*)

Disusunnya kajian yang mencakup parameter penilaian tutupan lahan yang dapat diintegrasikan ke dalam penghitungan indeks kualitas tutupan lahan diharapkan dapat mengembangkan metode penghitungan indeks kualitas tutupan lahan berbasis pembobotan kelas tutupan lahan

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan model, melalui pertimbangan fungsi ekologi yaitu: biodiversitas, konservasi tanah, iklim mikro dan cadangan karbon, serta analisis *Normalisasi permutation importance* dan *Practical-based judgement* (penilaian berbasis pakar) maka dihasilkan nilai koefisien kelas tutupan lahan seperti disajikan pada tabel dibawah

Tabel 14. Perbandingan nilai koefisien antara hasil model dengan hasil penilaian koefisien KLHK

No	Kelas Tutupan Lahan	Nilai Kontribusi (Hasil Model)	Nilai Koesifien (Hasil Model)	Nilai Koesifien (KLHK)
1	Hutan Primer	30,91	1,00	1,00
2	Hutan Sekunder	26,71	0,89	0,90
3	Hutan Tanaman	20,30	0,68	0,80
4	Belukar Rawa	16,02	0,53	0,60
5	Perkebunan	11,68	0,39	0,45
6	Belukar	15,24	0,51	0,40
7	Pertanian Lahan Kering Campur	13,15	0,44	0,40
8	Pertanian Lahan Kering	8,22	0,27	0,35
9	Rawa	13,19	0,44	0,35
10	Sawah	12,44	0,41	0,35
11	Savana	6,80	0,23	0,20
12	Transmigrasi	4,96	0,17	0,20
13	Bandara/Pelabuhan	4,49	0,15	0,15
14	Tambak	3,40	0,11	0,10
15	Tubuh Air	3,40	0,11	0,10
16	Tanah Terbuka	3,49	0,12	0,10
17	Permukiman/Lahan Terbangun	2,39	0,08	0,10
18	Pertambangan	1,23	0,04	0,05

Pada PK Kasubdit Perencanaan ditargetkan 1 kajian dapat diselesaikan terkait dengan pembobotan koefisien kelas tutupan lahan, dengan diselesaikannya kajian ini maka telah target yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Indonesia Hijau

Meskipun nilai IKTL ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan, Ditjen PPKL secara terus menerus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah daerah dengan harapan secara bersama-sama merealisasikan perencanaan pembangunan dan tata ruang sesuai dengan kewenangannya. Salah satu upaya untuk pembinaan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas tutupan lahan, maka Direktorat Jenderal PPKL sejak tahun 2022 melakukan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah melalui Indeks Respon Kinerja Daerah: Program Indonesia Hijau. Penilaian dilakukan terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Penilaian kinerja ini mencakup tujuh indikator yaitu peraturan dan kebijakan, struktur dan kompetensi SDM, perencanaan kegiatan, implementasi, pelibatan pemangku kepentingan, publikasi dan inovasi.

Indonesia Hijau mendukung pelestarian hutan dan lahan kritis dengan langkah-langkah seperti rehabilitasi hutan dan lahan, penanaman kembali di area terdegradasi untuk meningkatkan tutupan vegetasi, perlindungan kawasan lindung melalui implementasi regulasi untuk melindungi hutan lindung dan kawasan konservasi serta penambahan ruang terbuka hijau dengan cara

mendorong taman kota dan ruang hijau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.:

Berdasarkan hasil evaluasi pengisian Indonesia Hijau tahun 2024, maka status daerah yang melakukan pengisian data mengalami perbaikan dibanding tahun 2023. sebagaimana terlihat pada Tabel 17.

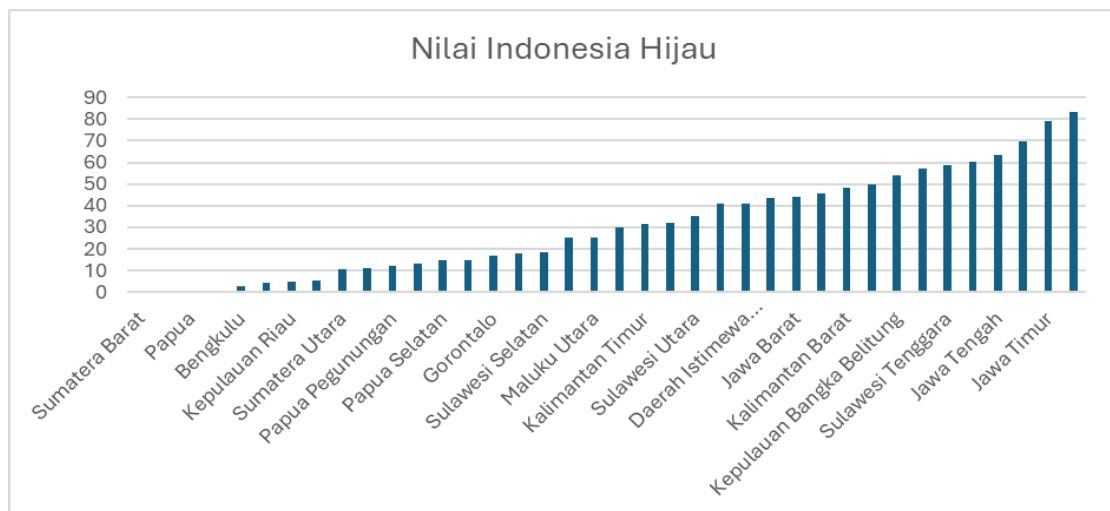
Tabel 15. Status Pengisian Program Indonesia Hijau 2024

Status Pengisian	Provinsi		Kabupaten/Kota	
	2023	2024	2023	2024
Tidak membuka aplikasi	1	0	15	0
Tidak mengisi aplikasi	1	1	54	63
Mengisi aplikasi	36	37	445	451
Total	38	38	514	514

Sedangkan tingkat pengisian data pada tujuh indikator tersebut, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengalami peningkatan sebagaimana pada Tabel 17, peningkatan jumlah kabupaten/kota dan provinsi yang mengisi program Indonesia Hijau, disebabkan adanya pendampingan pengisian oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan bersama Pusat Studi Lingkungan Hidup di masing-masing ekoregion.

Tabel 16. Perbandingan Pengisian Program Indonesia Hijau 2022-2024

	2022	2023	2024
Kabupaten/Kota	81,52%	86,58%	87,74%
Provinsi	85,29%	89,47%	97,37%



Berdasarkan hasil penilaian Indonesia Hijau diketahui bahwa pada tingkat provinsi berkisar antara 0 - 83,4. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota nilai Indonesia Hijau berkisar antara 0-90,40. Adapun posisi sepuluh besar diraih oleh provinsi Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Kep. Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.

Kerja Sama Universitas Mulawarman

Pelaksanaan pendampingan penyusunan rencana aksi tahun 2024 dilakukan oleh Direktorat PKL dan Universitas Mulawarman. Pendampingan yang dilakukan oleh Universitas Mulawarman yaitu 4 kabupaten/kota dan 4 provinsi regional kalimantan yaitu: Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kota Pontianak, Kota Banjar Baru, Kab. Pulang Pisau dan Kota Tarakan.

Berikut salah satu penjelasan rencana aksi / rekomendasi program yang perlu dilakukan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Tarakan. Rencana Aksi Provinsi Kalimantan Selatan dengan kegiatan yang perlu dilakukan antara lain: program meningkatkan potensi tutupan lahan non hutan dengan sistem pemantauan HCV pada area Perkebunan; mengimplementasikan Gerakan Revolusi Hijau terkait pengayaan penanaman di kawasan hutan seperti peningkatan luas tutupan lahan bervegetasi; penanaman pada lahan kritis, melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan instansi lainnya agar program yang dijalankan dapat disinergikan.

Program yang akan dilakukan oleh Kota Tarakan dan menyukseskan kegiatan FOLU Net Sink 2030 adalah : melakukan penanaman dan pemilihan jenis pohon yang akan ditanam dari golongan tanaman buah-buahan lokal ; melakukan pemeliharaan tanaman secara berkala pasca penanaman termasuk di dalamnya melakukan pemangkasan jika diperlukan ; melibatkan swasta dan masyarakat dalam program penyelenggaraan perlindungan pohon pada area yang menjadi milik atau dikuasai; penetapan peningkatan luas kawasan non hutan sesuai dengan RTH dalam RTRW khususnya di kawasan perkotaan sesuai dengan renstra DLH Tahun 2021 - 2026.

Rekomendasi program peningkatan IKL, IKA dan IKU di Kota Tarakan di antaranya sebagai berikut: meningkatkan program penanaman pohon di lahan kritis sesuai dengan kriteria dan jenis pohon yang direkomendasikan oleh dinas terkait; melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan instansi lainnya agar program yang dijalankan dapat disinergikan ; program pembuatan IPAL Komunal untuk mengurangi masuknya limbah domestik secara langsung ke badan air sungai khususnya di Kota Tanjung Selor ; melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah tanpa bakar.

Peningkatan keterisian IRLH Regional Kalimantan pada tahun 2024 juga tidak lepas dari dukungan pemerintah provinsi khususnya Provinsi Kalimantan Timur yang melakukan pendampingan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengisian IRLH ini. Walaupun demikian masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam rangka mengisi IRLH pada masa yang akan datang, terutama data-data yang harus disediakan sebelum melakukan penginputan data dalam menu IRLH di dalam aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Tingkat pemahaman tim IKLH di tingkat kabupaten/kota di seluruh wilayah regional Kalimantan terhadap pengisian menu IRLH dari berbagai indikator setiap program masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari menu isian yang diisi serta lampiran yang disertakan, walaupun tingkat keterisian sudah memenuhi kadang tidak sesuai dengan pertanyaan dan jawabannya dalam aplikasi.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota regional Kalimantan dalam pelaksanaan program ini yaitu: pelaksanaan pemantauan untuk IKLH adalah tidak semua Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengalokasikan anggarannya untuk melakukan pemantauan kualitas udara, air,

lahan dan gambut secara mandiri. Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran, sehingga untuk komponen udara ini hanya mengandalkan data dari KLHK saja, pemerintah Kabupaten/Kota seharusnya membentuk tim IKLH lintas sektoral atau lintas SKPD.

Adapun rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengisian IRLH sebagai berikut:

- a. melakukan pelatihan atau bimbingan teknis terkait dengan pengisian IKLH dan IRLH
- b. pendampingan bagi kabupaten/kota dalam melakukan pengisian IRLH agar data yang dilampirkan sesuai dengan isinya
- c. pembinaan secara terstruktur dan masif agar target IKLH dan IRLH dapat dicapai

3.2.2 Capaian Kinerja Subdit Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan

Capaian Kinerja Subdit Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase
1	Luas lahan rusak/tidak produktif yang dipulihkan	120 ha	150,08 ha	1,25
2	Jumlah industri yang taat dalam pengendalian kerusakan lahan	113 industri	industri	0,00
3	Jumlah perusahaan yang meningkat nilai kinerjanya dalam pengendalian kerusakan lahan sebesar 50% dari kategori merah	22 industri	industri	0,00
4	Jumlah kelompok pengelola pemulihan lahan	13 kelompok	16 kelompok	1,23

Pemulihan

Pemulihan kerusakan lahan yang dilakukan Ditjen PPKL sejak tahun 2020 - 2024 mencapai luasan 507,38 ha yang tersebar pada sejumlah provinsi seperti Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.



Gambar 6. Lokasi Pemulihan di Tahun 2020-2024



Gambar 7. Tren Luasan Area yang Dipulihkan Tahun 2020-2024

Pemulihan kerusakan lahan yang dilakukan tahun 2024 seluas 150,08 ha yang tersebar di 15 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Toba, Kabupaten Merangin, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten

Magelang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Bima, Kabupaten Gianyar dan Kota Banjarbaru.

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target RPJMN 2024	Target Renstra KLHK 2024	Target Renstra PPKL 2023	Target Renstra PPKL 2024	Target Renja PPKL 2024	PK 2024	Realisasi 2024	Capaian 2023 (%)	Capaian 2024 (%)
Luasan lahan yang dipulihkan kerusakannya		120 ha	120		120 ha	120 ha	120 ha	150,08 ha		125%

Kegiatan pemulihan lahan yang dilakukan selama kurun waktu tahun 2024 dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu:

1. Usulan aspirasi anggota DPR Komisi IV bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
2. Usulan Pemerintah Daerah, dan
3. Usulan Kelompok Masyarakat.

Kegiatan pemulihan dilakukan diprioritaskan pada lahan-lahan bekas tambang masyarakat yang terlantar, serta usulan lokasi kerusakan lahan lainnya. Hampir secara keseluruhan kegiatan didanai dengan APBN dengan mekanisme pelaksanaan bekerja sama dengan kelompok masyarakat setempat sebagai pelaksana kegiatan. Kegiatan pemulihan lahan dilakukan melalui tahapan antara lain:

1. Perencanaan, kegiatan perencanaan pemulihan diawali dari koordinasi dan sosialisasi bersama stakeholder, dilanjutkan dengan penentuan lokasi prioritas kegiatan pemulihan, dilanjutkan dengan survey lapangan, dan diakhiri dengan penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) pemulihan lahan.
2. Pelaksanaan, setelah DED tersusun pada tahapan berikutnya adalah proses eksekusi pelaksanaan fisik di lapangan sesuai dengan DED yang telah disusun.

Untuk mengakomodir keinginan Masyarakat setempat, agar pemulihan yang dilakukan berkembang dan produktif sebagai sumber perekonomian baru di

Tingkat tapak, maka model pemulihan yang dilakukan menyesuaikan dengan aspirasi Masyarakat setempat. Untuk tahun 2024 ini, model pemulihan yang dilaksanakan sesuai dengan table dibawah ini:

Tabel 17. Pemulihan Kerusakan Lahan Tahun 2024

No	Nama Desa/ Kecamatan	Nama Kabupaten/ Provinsi	Kategori / Jenis Tambang	Pelaksana	Model Pemulihan	Luasan (Ha)
1	Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka	Kabupaten Banjarbaru/ Kalimantan Selatan	Lahan bekas tambang intan	Kelompok Masyarakat Mufakat	Agroforestry	7,0
2	Desa Pegundungan, Kecamatan Pejawaran	Kabupaten Banjarnegara/ Jawa Tengah	Lahan kritis	Kelompok Tani Maju Bersama	Pertanian regeneratif	16,0
3	Desa Kalodu, Kecamatan Langgudu	Kabupaten Bima/Nusa Tenggara Barat	Lahan kritis	Kelompok Tani Banggarada Lestari	Agroforestry	10,8
4	Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber	Kabupaten Cianjur/Jawa Barat	Lahan kritis	Kelompok Masyarakat Agro Cibokor Lestari	Agroedu Wisata	6,4
5	Kelurahan Pananggung, Kecamatan Tarogong Keler	Kabupaten Garut/Jawa Barat	Lahan bekas tambang pasir	Kelompok Paguyuban Guntur Berkarya	Eduwisata	5,0
6	Desa Suwat, Kecamatan Gianyar	Kabupaten Gianyar/Bali	Lahan kritis	Kelompok Masyarakat Gerakan Menjaga Sungai dan Hutan	Area konservasi air	9,85
7	Desa Datar dan Desa Bunder, Kecamatan Cidahu	Kabupaten Kuningan/Jawa Barat	Lahan bekas tambang pasir	Kelompok Swadaya Masyarakat Data Mandiri	Agrowisata	6,0
8	Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan/Lampung	Lahan kritis	Kelompok Masyarakat Waway Jejama Kedaton	Ruang terbuka hijau	6,0

9	Desa Mangli, Kecamatan Kali Angkrik	Kabupaten Magelang/Jawa Tengah	Lahan pertanian	Kelompok Masyarakat Tirta mulya	Wana	Agrowisata	15,55
10	Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pangkalan Jambu	Kabupaten Merangin/Jambi	Lahan bekas tambang emas	Kelompok Masyarakat Mas	Tanjung	Ecopark	10,68
11	Kelurahan Manarang Kec.Mattiro Bulu	Kabupaten Pinrang/Sulawesi Selatan	Lahan bekas tambang pasir	Kelompok Masyarakat	Manarang	Ruang terbuka hijau	23,6
12	Desa Banda, Kecamatan Tarano	Kabupaten Sumbawa/Nusa Tenggara Barat	Lahan kritis	Kelompok Tani Hutan Tari Pemendi		Agroforestry	11,5
13	Desa Purbosari, Kecamatan Liangan	Kabupaten Temanggung /Jawa Tengah	Lahan bekas tambang pasir	Kelompok Masyarakat Lumbung	Watu		5,8
14	Desa Suanae, Kecamatan Miomaffo Barat	Kabupaten Timor Tengah Utara/Nusa Tenggara Timur	Lahan kritis	Kelompok Tani Hutan Usapi		Agroedu Tourism	8,7
15	Desa Haunatas I, Kecamatan Laguboti	Kabupaten Toba/Sumatera Utara	Lahan kritis	Kelompok Masyarakat Nusantara Ecology Care Unit Haunatas I	Swadaya Green Community Desa	Agroforestry	7,55
Total							150,43

(Sumber: Direktorat PKL, 2024)

Kegiatan pemulihan lahan pada 2024 di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kuningan diuraikan sebagai berikut:

1. Kabupaten Banjarnegara

Kegiatan pemulihan kerusakan lahan di Kabupaten Banjarnegara dilakukan pada lahan kritis yang memiliki potensi pada terjadinya erosi dan longsor yang dapat menyebabkan sedimentasi di Sungai dan Waduk Mrican. digunakan untuk mitigasi erosi dan longsor yang dapat menyebabkan sedimentasi ke Sungai dan Waduk Mrican. Lahan yang digunakan untuk

pemodelan kegiatan pemulihan lahan kritis merupakan lahan Desa seluas 10 ha dan lahan masyarakat seluas 6 ha dengan lokasi titik koordinat 7°15'1.07"S; 109°49'43.19"E di Desa Pegundungan, Kecamatan pejawaran. Kegiatan pemulihan ini bertujuan mengurangi sedimentasi sungai ke Kali Beji yang berkontribusi terhadap sedimentasi di Waduk Mrican. Model pemulihan di Kabupaten Banjarnegara adalah Pertanian Regeneratif sebagai jasa ekosistem berupa jasa pengaturan dan jasa penyediaan. Jasa pengaturan meliputi pengendalian erosi dan longsor sebagai upaya pengurangan sedimentasi sungai, adapun jasa penyediaan berupa penyediaan pangan dan air.

Konsep pemulihan yang dilakukan di Kabupaten Banjarnegara adalah:

a. Konservasi tanah

Konservasi tanah dilakukan dengan tanaman berkanopi (bertajuk) yaitu tanaman kopi, jeruk, kopi, apel, pete, lamtoro, indigofera dan singkong karet. Tanaman ini berfungsi mengurangi aliran permukaan akibat hujan yang menyebabkan erosi dan sedimentasi serta meningkatkan kemampuan resapan air dalam menyimpan air hujan. Sistem perakaran tanaman yang berupa akar tunggang dengan model penanaman berupa model tanam pagar dengan jarak 1 x 1meter dalam satu jalur dan 1 x 3meter sesuai kontur dapat menopang tanaman dan mencegah longsor.

b. Konservasi Air

Konservasi Air dilakukan secara mekanis maupun secara vegetatif. Konservasi secara mekanis dengan membangun penangkap air hujan, penangkap embun dan pembuatan embung untuk penampungan air sebagai sumber pengairan tanaman di sekitar lokasi. Konservasi air juga dilakukan pada sekitar mata air dengan menanam tanaman pelindung mata air yaitu tanaman picung (kluwek), tanaman jambu air serta tanaman jambu batu (jambu biji kecil).

Total tanaman yang ditanam pada areal 16 ha adalah 7994 tanaman. Tanaman kopi yang ditanam diperkirakan dapat dipanen pada tahun ketiga. Panen perdana pada tahun ketiga dan keempat dengan jumlah 5000 pohon sekitar 0,75 kg per tanaman. Hasil panen pada tahun ketiga dan keempat diperkirakan mencapai Rp. 31.000.000,00 – Rp. 37.000.000,00 per tahun. Puncak panen pada tahun kelima sampai tahun ke duapuluh dapat mencapai 5

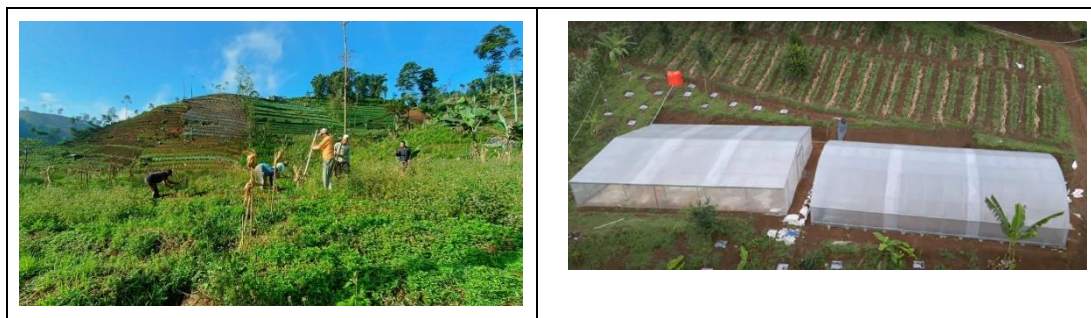
kg per tanaman dengan hasil panen diperkirakan Rp. 210.000.000,00 – Rp. 250.000.000 per tahun. Tanaman jeruk dan tanaman apel saat ini termasuk tanaman produktif baru yang ditanam di lahan Desa maupun lahan masyarakat sehingga perkiraan produksi belum bisa dihitung terkait kemahiran kelompok dalam pengelolaan tanaman tersebut. Untuk keberlanjutan maka perlu dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pemeliharaan tanaman jeruk dan apel, agar produktivitas tanaman dapat berkelanjutan.

Fasilitas penunjang selain sebagai bangunan konservasi juga terdapat bangunan greenhouse sebagai pendukung kegiatan pertanian. Saat ini greenhouse sudah dimanfaatkan untuk menanam selada air dan pakcoy. Hasil penanaman ujicoba pakcoy pada instalasi NFT sebanyak 10 buah adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Potensi Ekonomi Kab. Banjarnegara

Komoditas	Hasil panen (kg)	Harga/kg	Total Rupiah
Selada	20	30,000.00	600,000.00
Pakcoy	7.5	20,000.00	150,000.00
Total Panen			750,000.00





Gambar 8. Sebelum & Sesudah Kegiatan Pemulihan Kab. Banjarnegara

Pelaksanaan kegiatan pemulihan lahan ini dilakukan oleh Kelompok Tani Maju Bersama, sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat petani lokal. Selanjutnya, guna menjamin perawatan lahan yang maksimal, maka pengelolaan lahan yang dipulihkan akan dilakukan oleh pemerintah desa selama tiga tahun pertama. Pada tahun berikutnya, apabila kondisi tanaman sudah terpelihara dengan baik maka akan diserahkan ke BUMDES untuk pengelolaan agrowisatanya.

2. Kabupaten Temanggung

Kawasan Edu Wisata Watu Lumbung yang merupakan lahan bekas tambang galian C yang dibangun oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan dengan konsep *Agroforestry*. Kawasan ini dibangun sebagai upaya penyediaan jasa lingkungan seperti pemulihan lingkungan berupa konservasi tanah dan air sebagai pengendali erosi melalui penanaman pohon dan dengan mengatur *surface runoff* air hujan. Konservasi tebing juga dilakukan di Watu Lumbung pada tebing-tebing bekas galian tambang agar tidak terjadi longsor. Konservasi tebing dilakukan dengan tanaman *covercrop* menggunakan media tanam *stiqslope*. *Stiqslope* merupakan media tanam yang berasal dari serat kayu dan hancuran sedimen bebatuan yang mengalami proses khusus, mampu menempel dengan baik pada permukaan yang keras, seperti cadas, batu, bahkan porselin. Media *stiqslope* berdaya serap tinggi dan memiliki daya rekat yang baik ke permukaan-permukaan keras. Dalam proses pembuatannya diperkaya dengan pupuk organik kaya nutrisi, yang mampu menunjang pertumbuhan benih yang ditanam dengan baik. Metode ini bisa menjadi alternatif pengganti *hydroseeding* dalam menghijaukan tebing-tebing.

Adapun *covercrop* yang digunakan yaitu *Calapogonium mucunoides* dan *Centrosema pubescen*.

Selain fungsi konservasi jasa lingkungan yang diperoleh, kegiatan pemulihan ini juga bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui penanaman komoditas tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomi. Kawasan Edu Wisata Watu Lumbung menjadi salah satu Kawasan yang akan dikembangkan menjadi destinasi wisata agro yang bersinergi dengan destinasi wisata Situs Liyangan yang ada di Desa Purbosari.

Kawasan Edu Wisata Watu Lumbung dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa gapura, gazebo, toilet dan Embung. Adapun komoditas yang ditanam yaitu pohon Kopi, Durian, Alpukat, Jeruk, Strawberry, Cemara, Bambu, Ketapang Kencana, Pakis Haji dan Bungur.

Potensi hasil panen dihitung berdasarkan produktivitas masing-masing tanaman:

Tabel 19. Potensi Ekonomi Kab. Temanggung

Jenis Tanaman	Jumlah (batang)	Produktivitas per Batang (kg)	Harga per kg (Rp)	Total Pendapatan (Rp)
Kopi	1.550	2	30.000	93.000.000
Jeruk	950	50	5.000	237.500.000
Strawberry	255	1	50.000	12.750.000
Alpukat Miki	100	100	15.000	150.000.000
Durian Musangking	400	50	100.000	2.000.000.000
Total Pendapatan				2.493.250.000

Perhitungan pendapatan yang disebutkan berlaku untuk kondisi produksi optimal, yang diperkirakan dapat tercapai setelah:

- Kopi, Jeruk, dan Alpukat: Tahun ke-5
- Strawberry: Tahun pertama (dengan panen reguler)
- Durian Musangking: Tahun ke-8 atau ke-9 untuk produksi optimal.

Pekerjaan pemulihan ini sepenuhnya dilaksanakan oleh kelompok masyarakat setempat dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).



Gambar 9. Sebelum & Sesudah Kegiatan Pemulihan Kab. Temanggung

3. Kabupaten Kuningan

Lokasi Taman Bunda berada di dua Desa yaitu Desa Datar dan Desa Bunder Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan Jawa Barat dengan luas total 5,8 Ha dan merupakan lahan bekas tambang pasir yang dibangun oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan dengan konsep Bumi Perkemahan dan *agroforestry*. Lokasi tersebut dibangun sebagai upaya penyediaan jasa lingkungan antara lain pemulihan terhadap lingkungan berupa konservasi tanah dan air sebagai pengendali erosi melalui penanaman pohon yang dapat mengatur *surface runoff* air hujan. Konservasi tebing tepatnya di lokasi Desa Datar juga dilakukan pada tebing-tebing bekas galian tambang sehingga tidak terjadi longsor dan juga

dibangunnya saluran parit (sedimen) yang berfungsi agar air hujan dari atas tebing dialirkan ke sungai melalui saluran parit (sedimen), konservasi tebing dilakukan dengan tanaman atau pohon konservasi sehingga dapat mencegah erosi dan longsor, membantu mengatur siklus air dan membantu menjaga keanekaragaman hayati, seperti pohon trembesi, flamboyan, pulai, kerai payung, dadap merah, pinus, palem, mahoni, kayu putih, suren, bambu tamiang, durian, secang, aren, jambu crystal, manga gedong dan pohon sawo.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah sebagai upaya perbaikan kualitas lingkungan lahan bekas tambang yang bermanfaat juga sebagai:

1. Sarana Rekreasi: Menjadikan sarana rekreasi alam untuk warga Desa Datar, Desa Bunder dan Masyarakat Kabupaten Kuningan
2. Mendorong Ekonomi Lokal: Memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi perekonomian Desa Datar, Desa Bunder dan sekitarnya
3. Bumi Perkemahan: Menjadi Sarana Bumi Perkemahan bagi Sekolah SD/SMP/SMA ataupun Umum dengan fasilitas yang memadai.
4. Melestarikan Lingkungan dengan pengelolaan yang berkelanjutan
5. Konservasi air, tanah dan udara di sekitar lokasi bekas tambang: Melakukan penanaman pohon antara lain: Trembesi, Flamboyan, Pulai, Kerai Payung, Pinus, Dadap Merah
6. Menjadikan sumber pendapatan bagi masyarakat Cidahu dan sekitarnya melalui selain Bumi Perkemahan juga Ekowisata dengan penjualan hasil panen buah antara lain seperti Jambu, Mangga, Sawo, durian, secang dan hasil panen dari tanaman pertanian (Jagung, cabe, terong, tomat dan kacang Panjang)

Lokasi Taman Bunda di Desa Datar dan Desa Bunder Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan selain dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti *typical* sirkular, *signage*, *tower* air, kolam penampung air, *system* penyiraman, penangkap sedimen juga ditanamin pohon konservasi, pohon penghijauan seperti *acalypha* teh tehan dan philojari yang berfungsi untuk

mengurangi polusi udara, mengurangi dampak perubahan iklim, mencegah banjir, menurunkan suhu udara, menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman, menjadi habitat bagi satwa liar, menyediakan lingkungan yang sehat untuk aktivitas fisik, juga pohon *groundcover* seperti rumput dan pohon pertanian seperti cabe, tomat, kacang dan terong.

Pekerjaan pemulihan ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Datar Mandiri” setempat dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 680.000.000 (Enam Ratus Delapan Pulu Juta Rupiah) Tahun Anggaran 2024.

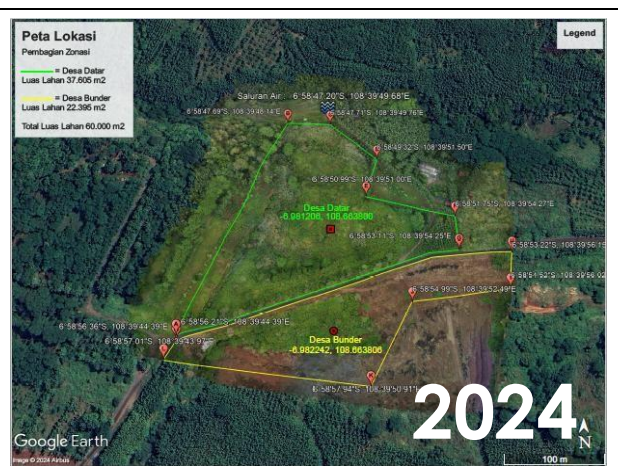
Tabel 20. Jenis Pohon atau tanaman pada kegiatan pemulihan kerusakan lahan di Kab. Kuningan

Jenis Tanaman	Jumlah
Pohon Konservasi	
Trembesi	12 pohon
Flamboyan	11 pohon
Pulai	6 pohon
Kerai Payung	29 pohon
Dadap Merah	30 pohon
Pinus	64 pohon
Palem	37 pohon
Mahoni	134 pohon
Kayu Putih	255 pohon
Suren	82 pohon
Bambu Tamiang	176 pohon
Durian	22 pohon
Secang	45 pohon
Pohon Konservasi Koleksi	
Aren	9 pohon
Jambu Crystal	9 pohon
Mangga Gedong	8 pohon
Sawo.	8 pohon
Tanaman Penghijauan	
Philo Jari	1985 polibag
Acalypha	5.512,69 polibag
Pohon Pertanian	
Cabe Rawit	975 polibag
Cabe Merah	975 polibag

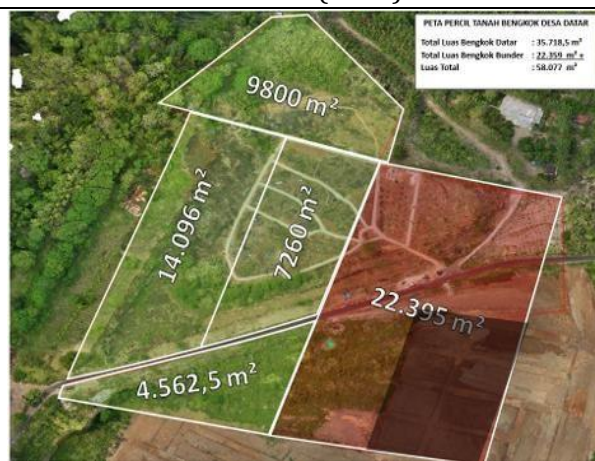
Jagung	2.786 butir
Tomat	558 polibag
Kacang	975 polibag
Tanaman Grouncover	
Kacang Hias	4.724.65 polibag
Rumput Odod	3.036.65 m ²
Rumput Gajah Mini	467.51 m ²



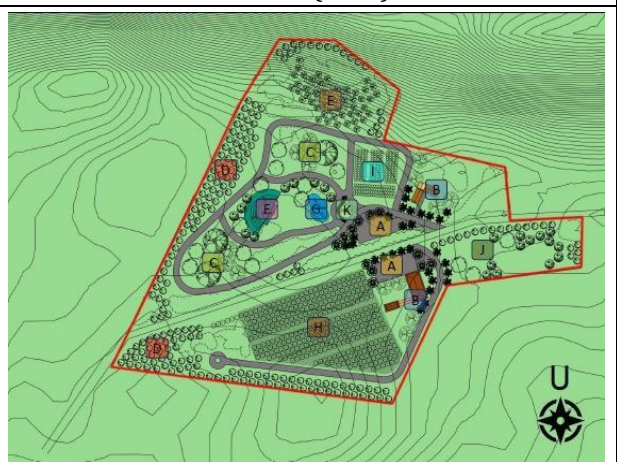
Calon Lokasi Pemulihan (6 Ha)



Calon Lokasi Pemulihan (6 Ha)



Lokasi Pemuihan (5,8 Ha)





Lokasi tebing Pemulihan (5,8 Ha) sebelum pemulihan dan proses pemulihan

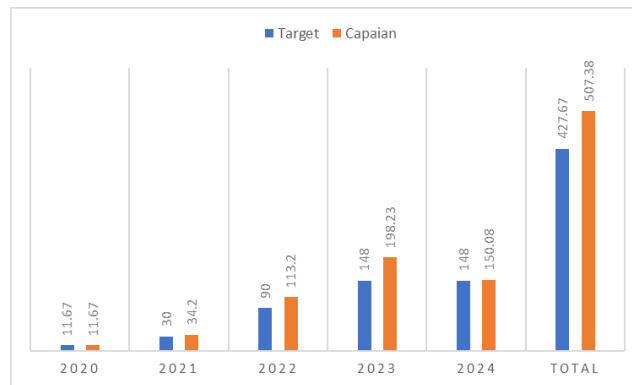
Daerah Rawa Longsor di Lokasi Pemulihan

Lokasi pemulihan setelah dilakukan pemulihan

Gambar 10. Sebelum & Sesudah Kegiatan Pemulihan Kab. Kuningan

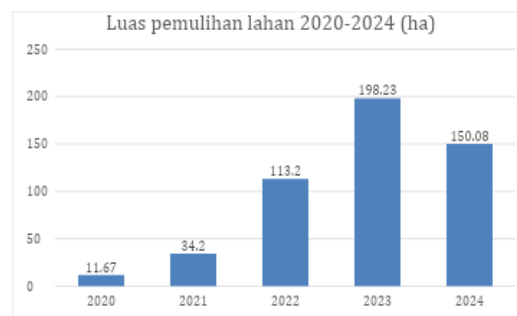
Berdasarkan target yang ditetapkan dalam PK Kasubdit Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan ataupun dalam PK Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan yaitu sebesar 120 ha maka capaian tahun ini sebesar 150.08 ha sudah melampaui target yang ditetapkan dalam PK.

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen PPKL dan capaian kegiatan pemulihan 2020-2023, ditambah capaian tahun 2024 maka kegiatan pemulihan sudah melewati target yang ditetapkan yaitu pemulihan yang sudah dilakukan seluas 507,38 ha dengan target Renstra 2020-2024 seluas 427,67 ha.



Gambar 11. Perbandingan Target dan Capaian Pemulihan 2020-2024

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa kegiatan pemulihan kerusakan lahan telah dilakukan pada kurun waktu tahun 2020-2024 dengan capaian luasan 507,38 ha yang tersebar di 49 lokasi, dengan luasan per tahun sebagaimana terlihat pada Gambar 67. Tren kegiatan pemulihan cenderung naik namun turun di tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian dalam memenuhi target total Renstra 2020-2024 sehingga dengan mengacu pada target tersebut maka pengerjaan kegiatan pemulihan di tahun 2024 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023).



Gambar 12. Tren Luas Lahan yang Difasilitasi Pemulihannya

Pelembagaan

Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di lokasi pemulihan kerusakan lahan diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat yang mengarah pada kemauan dalam mengembangkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan untuk kesejahteraan dalam mengelola kegiatan pemulihan kerusakan lahan. Dalam upaya tersebut, pelembagaan pengelolaan menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari kegiatan pemulihan.

Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil pemulihan lahan, dilakukan pelebagaan yang memberdayakan masyarakat desa sekitar. Pelebagaan yang telah dibentuk berupa BUMDES, BUMNAG dan POKMAS. Tahapan pendampingan pelebagaan pengelola pasca pemulihan kerusakan lahan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan dan koordinasi dengan Stakeholder
2. Pengumpulan dan Analisis Data
3. Pemetaan Bentang, Sosial, Ekonomi
4. Potensi Sumber Daya Alam
5. Pembentukan Lembaga pengelola lahan pasca pemulihan melalui Musyawarah
6. Pelatihan peningkatan kapasitas Masyarakat
7. Rencana kegiatan pengembangan
8. Pelaksanaan kegiatan ekspose

Untuk menjamin keberlanjutan kegiatan pemulihan, perlu dilakukan perawatan yang baik oleh lembaga pengelola. Perawatan ini memerlukan biaya antara lain penyulaman,penyiraman, pemupukan, dan perawatan fasilitas yang telah dibangun. Pelaksanaan perawatan lokasi pemulihan saat ini masih dilaksanakan oleh pengelola secara swadaya. Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan untuk mengelola hasil pemulihan lahan sejak tahun 2016-2024 terbentuk sekitar 49 lembaga masyarakat, Tabel 23 menunjukkan lembaga masyarakat yang terbentuk pada tahun 2024.

Tabel 21. Pelebagaan yang dibentuk di tahun 2024

No.	Lokasi Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Lembaga Pemulihan	Lembaga Pengelola
1.	Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan	Lampung	Kelompok Masyarakat Waway Jejama Kedaton	Kelompok Masyarakat Waway Jejama Kedaton
2.	Desa Sukagumiwang, Kecamatan Sukagumiwang	Kabupaten Indramayu	Jawa Barat	Kelompok Masyarakat Mandiri Jaya	Kelompok Tani Sinawang Makmur
3.	Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka	Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	Kelompok Masyarakat Mufakat	Pokdarwis Pumpung Trisakti
4.	Desa Kalodu, Kecamatan Langgudu	Kabupaten Bima	Nusa Tenggara Barat	Kelompok Tani Banggarada Lestari	Kelompok Tani Banggarada Lestari
5.	Kelurahan	Kabupaten Pinrang	Provinsi	Kelompok	Kelompok Tani

No.	Lokasi Kegiatan	Kabupaten/Kota	Provinsi	Lembaga Pemulihan	Lembaga Pengelola
	Manarang Kec.Mattiro Bulu		Sulawesi Selatan	Masyarakat Manarang	Padalaing-Padalaing
6.	Desa Suanae, Kecamatan Miomaffo Barat	Kabupaten Timur Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	Kelompok Tani Hutan Usapi	Kelompok Tani Hutan Usapi
7.	Desa Datar dan Desa Bunder, Kecamatan Cidahu	Kabupaten Kuningan	Jawa Barat	Kelompok Swadaya Datar Mandiri	Pemerintah Desa Bunder dan Pemerintah Desa Datar
8.	Desa Mangli, Kecamatan Kali Angkrik	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	Pokmas Wana Tirta mulya	PT. Meravi
9.	Desa Haunatas I, Kecamatan Laguboti	Kabupaten Toba	Sumatera Utara	Kelompok Swadaya Mayarakat Green Ekologi Community	Kelompok Swadaya Mayarakat Green Ekologi Community
10.	Desa Pegundungan, Kecamatan Pejawaran	Kabupaten Banjarnegara	Jawa Tengah	Kelompok Tani Maju Bersama	Pengelolaan oleh Pemerintah Desa selama 3 tahun untuk pemeliharaan, apabila sudah stabil secara pertumbuhan tanaman akan diserahkan ke BUMDES
11.	Kelurahan Pananggung, Kecamatan Tarogong Keler	Kabupaten Garut	Jawa Barat	Kelompok Paguyuban Guntur Berkarya	Belum Final
12.	Desa Banda, Kecamatan Tarano	Kabupaten Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	KTH Tari Pamendi	KTH Tari Pamendi
13.	Desa Suwat, Kecamatan Gianyar	Kabupaten Gianyar	Bali	Kelompok Masyarakat Menjaga Sungai dan Hutan	
14.	Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber	Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	Kelompok Masyarakat Agro Cibokor Lestari	BUMDESA Jaya Bersama Cibokor
15.	Desa Purbosari, Kecamatan Liangen	Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	Kelompok Masyarakat Watu Lumbung	
16.	Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pangkalan Jambu	Kabupaten Merangin	Jambi	Kelompok Masyarakat Tanjung Emas	Kelompok Masyarakat Tanjung Emas

Beberapa pengelola telah berhasil mengelola dan memanfaatkan hasil pemulihan lahan dan memperoleh manfaat ekonomi. Pendapatan tersebut,

digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas. Namun sebagian besar lembaga yang terbentuk saat ini masih belum aktif secara organisasi untuk mengelola lahan pemulihan. Hal ini terkendala SDM yang masih belum kreatif dalam melaksanakan kegiatan yang bisa mengundang masyarakat dan menambah pemasukan. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kemampuan dengan pendampingan SDM BUMDES dan kelompok agar bisa membuat kegiatan yang dapat menunjang keberlanjutan program pemulihan kerusakan lahan. Pendampingan dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas kelompok, antara lain: kegiatan branding kelompok, teknik pemasaran program, manajerial kelompok dalam pengelolaan keuangan BUMDES dan membangun kemitraan dengan organisasi yang lain.



Gambar 13. Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina tahun 2020 – 2024

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja Tahun 2020-2024 Subdit Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan jika di bandingkan dengan Renstra 2024-2025 adalah sebagai berikut

Tabel 22. Capaian Subdit PSKL dibandingkan dengan Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%Kinerja
1	Terpulihkannya lahan terlanjar bekas tambang pertambangan rakyat	Luas Lahan bekas tambang rakyat yang difasilitasi pemulihannya	427,67	507,38	118,64%

Proper

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan atau dikenal dengan PROPER merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Program unggulan Ditjen PPKL ini dilaksanakan oleh seluruh direktorat dibawah pembinaan Sekretariat PROPER yang berada di Sekretariat Ditjen PPKL. Salah satu

diantaranya adalah Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan untuk perusahaan pertambangan maka implementasi program ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Sub Direktorat Pengendalian Sumber Kerusakan Lahan mulai dari proses penerimaan dokumen melalui aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik), dilanjutkan, penilaian dan berakhir pada penyusunan raport hasil penilaian berdasarkan Kriteria Kerusakan Lahan. Sebanyak 164 perusahaan pertambangan telah bernilai taat Kriteria Kerusakan Lahan mengindikasikan peningkatan ketaatan perusahaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan secara khusus kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi



Gambar 14. Luas lahan terganggu dibandingkan luas lahan revegetasi

Grafik ini memperlihatkan data terkait luas lahan terganggu dan luas lahan revegetasi sampai dengan Bulan Juni tahun 2024 pada peserta PROPER di sektor pertambangan. Berikut penjelasannya:

1. Jumlah Pit dan Kegiatan

Data menunjukkan bahwa jumlah pit tetap sama dengan 1.215, sementara jumlah kegiatan yang tercatat adalah 2.311.

2. Total Luasan Lahan Terganggu

Pada tahun 2024, total luas lahan terganggu tercatat sebesar 7.948,65 hektare. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 26.588,32 ha.

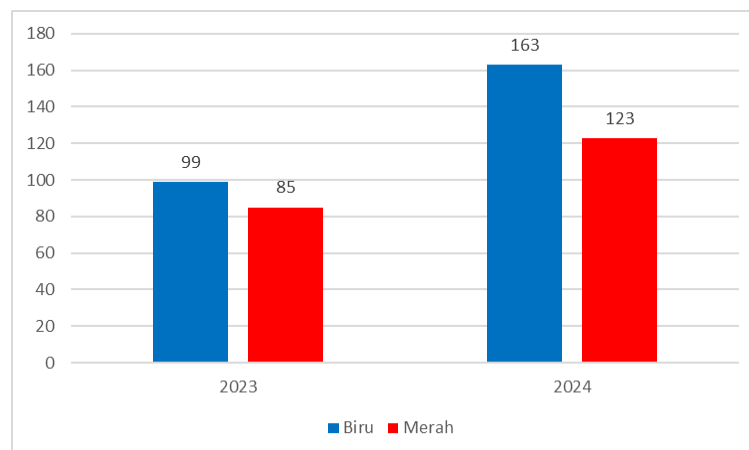
3. Total Luasan Lahan Revegetasi

Total luas lahan revegetasi sepanjang tahun 2024 adalah 4.400,12 hektare. Meskipun angka ini lebih kecil dibandingkan luas revegetasi tahun 2023 (11.149,72 ha), rasio antara luas revegetasi terhadap luas lahan terganggu lebih tinggi pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan efisiensi dalam upaya revegetasi.

4. Perbandingan Luasan Terganggu dan Revegetasi

Grafik batang memperlihatkan bahwa luas lahan terganggu masih lebih besar dibandingkan dengan luas revegetasi, dengan perbandingan sekitar 1,8:1. Hal ini lebih baik dibandingkan tahun 2023, yang memiliki perbandingan sekitar 2,4:1. Namun hal ini belum menggambarkan profil tahunan mengingat periode pelaporan hanya hingga Juni 2024.

Pada tahun 2024 capaian jumlah perusahaan yang mendapat rapor biru pada penilaian PROPER sebanyak 163 perusahaan dibandingkan dengan raihan rapor merah sebanyak 123 perusahaan (56% rapor biru dari keseluruhan). Angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya dengan capaian raihan rapor biru sebanyak 99 perusahaan dan rapor merah sebanyak 85 perusahaan (53% rapor biru dari keseluruhan).



Gambar 15. Capaian Peringkat PROPER KKL Tahun 2023 - 2024

(sumber LKJ Dit PKL 2023)

3.2.3 Capaian Kinerja Subbag TU

Penyelenggaraan Ketatausahaan merupakan komponen terpenting dalam pelaksanaan kegiatan, Dimana seluruh proses administrasi, anggaran maupun teknis pelaporan hasil kegiatan menjadi tanggung jawab bagian ketatausahaan. Sesuai dengan PERMENLHK nomor 15 tahun 2021 ada 8 kegiatan pokok yang menjadi tanggung jawab dan ujung tombak seluruh proses kegiatan, yaitu:

1. Administrasi Kepegawaian
2. Administrasi Keuangan
3. Administrasi Barang Milik Negara

4. Tata Persuratan
5. Kearsipan
6. Kerumah Tanggaan
7. Data dan Informasi
8. Administrasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Biro

Untuk menunjang kegiatan di atas, perlu kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak yang ada di internal Direktorat, sehingga capaian kinerja dapat sepenuhnya terlaksana. Adapun output masing-masing kegiatan sebagai berikut:

Tabel 23. Capaian Kinerja Subbagian TU

No	Kegiatan	Capain Kinerja Sesuai PK
1.	Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pembinaan pegawai sebanyak 2 kali sesuai target
2.	Administrasi Keuangan	Realisasi anggaran mencapai 99,69% atau sebesar Rp.21.546.939.847,- dari Rp.21.612.925,-
3.	Administrasi Barang Milik Negara (BMN)	• BMN yang diserahkan ke Masyarakat berupa Lokasi pemulihan sebanyak 15 Lokasi • BMN operasional perkantoran berupa laptop, scanner, printer sebanyak 11
4.	Tata Persuratan	Total persuratan selama kurun waktu 1 tahun sebanyak 1022 surat melebihi target
5.	Data dan informasi	• Capaian kinerja bulanan, triwulan • EMONEV bulanan • Laporan SPIP • Laporan Keuangan • Laporan BPK
6.	Laporan Administrasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Biro	Laporan SPIP triwulan dan Laporan Mandiri SAKIP

3.3 Capaian Realisasi Anggaran

• Capaian Penyerapan Anggaran

Direktorat PKL memiliki 4 (empat) sasaran unit kerja dengan pagu anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 19.998.255.000 (Sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 22.231.448.420,- (dua puluh dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau penyerapan anggaran mencapai 97,37%.

Tabel 24. Capaian Penyerapan Anggaran

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Penyerapan (%)
Tersedianya layanan data dan informasi kualitasutupan lahan	Data indeks kualitasutupan lahan	833.440.000	831.475.036	99,76
Telaksananya Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	766.107.000	763.925.012	99,72
Terpulihkannya lahan bekas pertambangan rakyat	Luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan	16.888.587.000	16.843.890.906	99,74
Tersedianya layanan kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian kerusakan lahan	Jumlah kab/kota yang meningkat kinerja pengendalian kerusakan lahan	3.124.791.000	3.107.648.893	99.45

• Capaian Efisiensi dan efektifitas

Nilai efisiensi kegiatan dalam mencapai 4 (empat) sasaran kegiatan Dit PKL diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja sasaran unit kegiatan terhadap capaian penyerapan anggaran, untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan efisien atau tidak efisien sesuai dengan anggaran yang ada. Indikator kinerja “Data indeks kualitasutupan lahan” memiliki nilai efisiensi sebesar 1,06 “Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya” memiliki nilai efisiensi sebesar 1.07 dan “Luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan” memiliki nilai efisiensi sebesar 0.83, dan “Jumlah Kab/Kota yang meningkat kinerja pengendalian kerusakan lahan” memiliki nilai efisiensi sebesar 0.89. Rataan nilai efisiensi kegiatan Direktorat PKL tahun 2023 sebesar 0.96 (< 1) menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan belum efisien dalam penggunaan anggaran. Secara lengkap, nilai efisiensi kegiatan dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 25. Efisiensi Kegiatan Dit PKL

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Serapan Anggaran (%)	Efisiensi
Tersedianya layanan data dan informasi kualitasutupan lahan	Data indeks kualitasutupan lahan	100	99,76	1.00
Telaksananya Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	100	99,72	1.00
Terpulihkannya lahan bekas pertambangan rakyat	Luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan	100	99,74	1.00
Tersedianya layanan kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian kerusakan lahan	Jumlah kab/kota yang meningkat kinerja pengendalian kerusakan lahan	88	99.45	0.88
Rata-Rata				0.97

Nilai efektifitas kegiatan dalam mencapai 4 (empat) sasaran kegiatan Direktorat PKL diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja sasaran unit kegiatan tahun berjalan terhadap capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya, untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan efektif atau tidak efektif sesuai dengan anggaran yang ada. Indikator kinerja “Data indeks kualitasutupan lahan” memiliki nilai efektifitas sebesar 1.01, “Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya” memiliki nilai efektifitas sebesar 1.00, “Luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan” memiliki nilai efektifitas sebesar 1.21. dan indikator kinerja “Jumlah Kab/Kota yang meningkat kinerja pengendalian kerusakan lahan” memiliki nilai efektifitas 1.01. Rataan nilai efektifitas kegiatan Dit PKL tahun 2024 sebesar 1.05 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah efektif dalam penggunaan anggaran. Secara lengkap, nilai efektifitas kegiatan dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 26. Efektifitas Kegiatan Dit PKL

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Capaian Kinerja 2020 (%)	Capaian Kinerja 2021 (%)	Capaian Kinerja 2022 (%)	Capaian Kinerja 2023 (%)	Capaian Kinerja 2024 (%)	Efektifitas
Tersedianya layanan data dan informasi kualitas tutupan lahan	Data indeks kualitas tutupan lahan	98,13	96,33	95,81	100	100	1
Telaksananya pemantauan kinerja pengendalian kerusakan lahan terhadap usaha dan/atau kegiatan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	100	100	100	100	100	1
Terpulihkannya lahan	Luas lahan yang dipulihkan	133	114	125,78	82	100	1,21
Tersedianya layanan kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian kerusakan lahan	Jumlah kab/kota yang meningkat kinerja pengendalian kerusakan lahan	-	-	-	87	88	1.01
Rata-Rata							1,05

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam bentuk melakukan penghitungan nilai IKTL. Hasil penghitungan IKTL Nasional Tahun 2024 adalah 61.96 di bawah target yang ditetapkan yaitu 65,9. Namun demikian nilai IKTL tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2023 menunjukkan peningkatan secara nasional sebesar 0.17 dari 61.79 menjadi 61.96.

Terdapat 10 kabupaten/kota yang mengalami penurunan kategori IKTL yaitu Kota Sorong, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Badung, Kota Kendari, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kota Bandung, Kota Pontianak, dan Kota Palembang.

Pemulihan kerusakan lahan terealisasi seluas 150,08 ha, kegiatan pemulihan ini dilakukan 15 lokasi yaitu Kabupaten Toba, Kabupaten Merangin, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Banjarbaru.

4.2. Kendala

- Proses penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) mengalami hambatan antara lain data tutupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan kriteria.
- Masih belum tersedianya perangkat pendukung yang dijadikan acuan dalam menilai kriteria kerusakan lahan
- Beberapa lokasi pemulihan mengalami perubahan disebabkan status kepemilikan lahan, kondisi kerusakan lahan, dan tidak sesuai dengan kriteria kerusakan lahan yang sudah ditentukan sebelumnya.
- Kesadaran masyarakat pengelola lahan pasca pemulihan dalam melakukan pengembangan potensi yang sebenarnya memberikan manfaat lebih kepada masyarakat tersebut masih kurang.

- Kesadaran Perusahaan dalam melakukan pengelolaan lingkungan khususnya industri tambang masih rendah

4.3. Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada Pemerintah Daerah terkait pengisian data RTH untuk penilaian IKTL, baik dari sisi kualitas data yang dilaporkan, potensi data RTH yang bisa dilaporkan, maupun tata cara pelaporan di dalam aplikasi.
- Perlu adanya penyusunan NSPK yang menjadi acuan dalam penentuan lokasi yang mengalami kerusakan lahan
- Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa serta masyarakat untuk menyepakati lokasi dan luasan lahan yang akan diusulkan untuk dilakukan pemulihan lahan.
- Koordinasi dengan pemerintah daerah juga perlu dilakukan untuk mendukung seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan.